





# Karya Buku

# **KAMPUS** KONSTITUSI

Kerja Sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Penerbit PT RajaGrafindo Persada





dilepaskan dari buku dan buku tidak terlepas dari peradaban.

"Mahkamah Konstitusi tidak bisa

Maka konstitusi, buku, dan peradaban adalah satu komponen yang membentuk perubahan di negara."

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

(Hakim Konstitusi RI)





# The Guardian of Constitution Literacy

Ketua Mahkamah Konstitusi































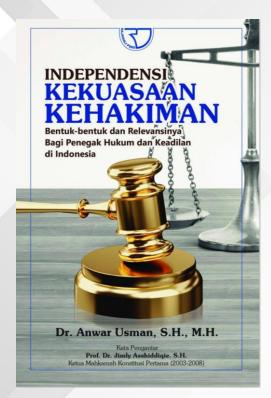
Dr. ANWAR USMAN, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

#### INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia





Intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum. Hal tersebut bukan hanya merugikan lembaga kekuasaan kehakiman semata, melainkan lebih merugikan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan.

Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dan lembaga kekuasaan kehakiman tidak lagi dapat melaksanakan kewenangannya secara maka tertib hukum di dalam independen, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi mengkhawatirkan.

Buku ini mendalami konsepsi filosofi urgensi independensi kekuasaan kehakiman, dengan merekonstruksi pandangan para pakar tentang independensi kekuasaan kehakiman. Serta bermaksud pula untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan mencarikan jalan keluarnya bagi lembaga peradilan.



Penulis:

Dr. ANWAR USMAN, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi RI)

ISBN : 978-623-231-511-2

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 334 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 130K

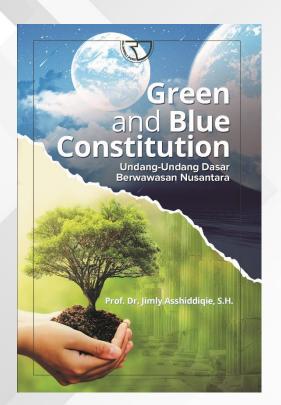




#### GREEN AND BLUE CONSTITUTION

#### **Undang-undang Dasar Berwawasan Nusantara**





Buku ini hadir untuk melanjutkan misi buku sebelumnya, yaitu Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945 dan telah ditambahkan dengan perkembangan-perkembangan baru dan juga perspektif sejarah yang lebih banyak.

Dalam buku ini, ditambahkan mengenai pengalaman bangsa Jerman dengan Konstitusi Bayaria tahun 1946 yang terkait dengan upaya membangun prinsip keseimbangan lingkungan dalam kehidupan bersama dalam wadah bernegara. Konstitusi Bavaria merupakan konstitusi pertama yang memuat pasal-pasal eksplisit mengenai gagasan perlindungan lingkungan hidup yang dewasa ini menjadi kesadaran umum umat manusia di seluruh dunia.

Selain itu, tentunya dalam buku ini juga ditambahkan pembahasan mengenai gagasan konstitusi biru. Gagasan Green and Blue Constitution dikaji dengan memperluas pengertian tentang konsep wilayah Negara Indonesia yang berdaulat, tidak hanya mencakup daratan dan perairan, tetapi juga wilayah udara, ruang angka, dan bahkan kawasan luar angkasa yang sangat penting untuk dijangkau dalam kerangka konstitusionalisme kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.



Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008)

ISBN : 978-623-372-136-3

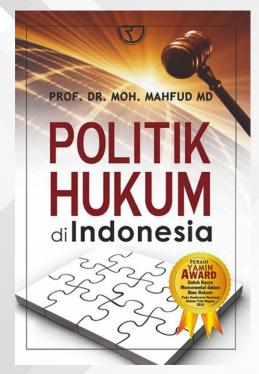
Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 202 hlm : 2021 Tahun : IDR 93K Harga





#### POLITIK HUKUM DI INDONESIA





Buku ini tergolong langka di Indonesia. Betapa tidak, tradisi menulis tentang materi hukum di negeri ini masih didominasi oleh metode normatif-deduktif. Metode ini tidak memperkaya pemahaman kita mengenai hukum yang sesungguhnya. Yang jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo

Selain memaparkan hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri M



Penulis:

Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2008-2013)

ISBN : 978-979-769-263-6

Ukuran : 16 X 24 cm Halaman : 430 hlm Tahun : 2018 Harga : IDR 130K

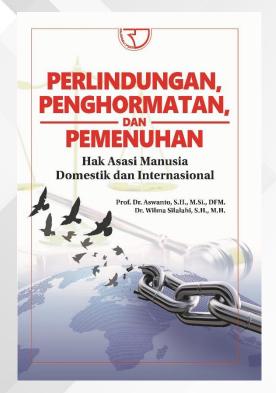




#### PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN DAN PEMENUHAN

Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional





Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta meletakkan hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang, hak asasi ada yang diperoleh langsung sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang bersumber dari negara. Namun, dalam pelaksanaan di kehidupan keseharian masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah dan dunia internasional waiib menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa diskriminasi sebagai kodrat manusia. Pemerintah, dalam fungsinya terhadap usaha penegakan hak asasi manusia tampil sebagai guardians of human rights, artinya pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang kondusif agar apa yang menjadi hak asasi manusia dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa diskriminasi.

Perkembangan hak asasi manusia dapat dikatakan seirama dengan perkembangan zaman dan kepentingan sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Oleh karenanya, hadirnya buku ini akan sangat bermanfaat untuk menambah referensi yang komprehensif tentang HAM untuk dibaca dan dipahami oleh semua kalangan yang berminat mempelajari Hak Asasi Manusia, baik dari kalangan domestik maupun internasional.

#### Penulis:

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI) Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

**ISBN** : 978-623-372-089-2

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 210 hlm Tahun : 2021 : IDR 95K Harga





#### ARGUMEN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN



Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang



Pembahasan substansial buku ini memberikan solusi terhadap upaya extraordinary crimes dengan menempatkan hukum pidana sebagai primum remedium bagi pengembalian kerugian keuangan negara. Temuan substansial buku ini, pendekatan Hukum Pidana sebagai primum remedium bagi pemecahan masalah hukum, dapat menyelesaikan polemik pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.

Selain itu, primum remedium sebagai pelaksanaan wacana asas keadilan selain wadah relasi interdisipliner antara hukum administrasi negara dan hukum pidana, juga diarahkan sebagai sarana legal problem solving terhadap perkembangan kejahatan yang masif dengan sifatnya yang extraordinary. Sehingga dengan demikian, akan terdapat garis yang tegas asas primum remedium bagi hukum pidana terkait pelaksanaan hubungan interdisipliner tersebut.

> Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. Guru Besar Hukum Pidana Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia

> > : 978 602 425 691 3



Penulis:

**ISBN** 

Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi)

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 272 hlm Tahun : 2019 : IDR 97K Harga





#### INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW





### **INDONESIAN** CONSTITUTIONAL LAW



Indonesia's hastily designed 1945 Constitution was supposed to be temporary. Yet the nation's first two presidents, Soekarno and Soeharto, used it as a basis for holding power for much of the country's first half-century of independence. When the 1945 Constitution was finally reformed and expanded through a series of amendments over 1999-2002, it ushered in asignificantly different state administrative system and practice. However, the amendments have not resolved all problems in Indonesia's political and legal System.

Drawing on their wealth of knowledge and experience, Saldi Isra and Pan Mohammad Faiz, two of Indonesia's leading constitutional law experts, shedlight on the challenges and developments of Indonesian constitutional law inthe post-amendment era. Taking readers behind the conflicts and controversies, they also offer suggestions on how the nation's constitutional rights and functions can be improved.

This book is essential reading for academics, scholars and "Indonesianists' desirous of broadening their knowledge of Indonesian constitutional law.



Penulis:

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. (Hakim Konstitusi) Pan Mohamad Faiz

: 978-623-372-048-9 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm : 248 hlm Halaman Tahun : 2021 : IDR 150K Harga

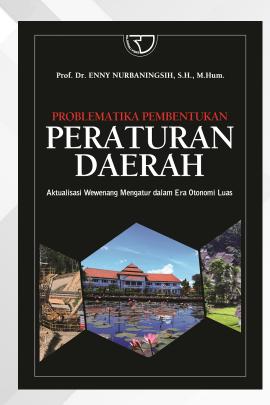




#### PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas





Buku Prof. Enny Nurbaningsih ini sangat komprehensif, kaya dan mencerahkan sehingga menjadi penting utk dibaca dan dijadikan rujukan baik di dunia riset dan pendidikan, maupun dalam praktik pembangunan, penerapan dan penegakan hukum yang terkait dengan peraturan daerah dlm sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

> Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008)

Semangat melakukan demokratisasi dalam kehidupan politik pasca Reformasi 1998 membawa Indonesia ke pilihan politik "otonomi luas" dalam mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah. Konsekuensinya Daerah pun mempunyai kewenangan yang semakin kuat dan meluas rentangannya dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda). Tak jarang secara aktual hal tersebut memunculkan inkosistensi atau tumpang tindih, bahkan pertentangan, antara satu Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

> Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2008-2013)



Penulis:

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. (Hakim Konstitusi)

ISBN : 978-623-231-150-3

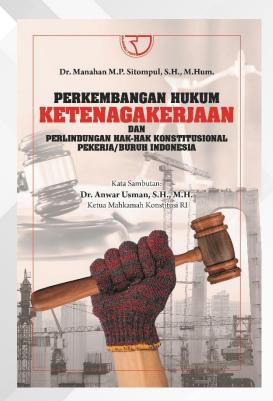
Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 300 hlm : 2019 Tahun Harga : IDR 154K





#### PERKEMBANGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL. PEKERJA/BURUH **INDONESIA**





Buku ini mengupas bagaimana perlindugan hak-hak konstitusional pekerja/buruh dalam perusahaan yang mengalami kepailitan, perlindungan hak-hak pekerja migran dan juga perlindungan hakhak pekerja/buruh dalam perkembangan kontemporer.

Lebih mendalam lagi juga mengupas hal ihwal perusahaan dinyatakan pailit dan insolvent, Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dapat hadir sebagai kuasa dalam rapat verifikasi dan memasukkan daftar tagihan-tagihan hak upah para pekerja/buruh yang belum dilunasi oleh pengusaha (debitor) kepada para buruh sebagai kreditor preferen. Di samping itu, selain pengaruh pandemi ada tantangan disrupsi di seluruh dunia yang dihadapi buruh terutama di era otomasi yang sedang berlangsung dengan tidak terbendungnya lagi digitalisasi.

Terbitnya buku ini diharapkan mampu membuka cakrawala dan khasanah keilmuan di kalangan mahasiswa, akademisi, serta lapisan masyarakat ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan penafsiran MK berkaitan dengan pasal-pasal yang diatur dalam UUD 1945.



#### Penulis:

Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.Hum. (Hakim Konstitusi)

**ISBN** : 978-623-372-144-8

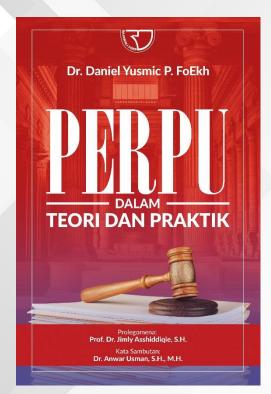
Ukuran : 15 x 23 cm : 250 hlm Halaman Tahun : 2021 Harga : IDR 105K





#### PERPU Dalam Teori dan Praktik





Selama ini kegentingan yang memaksa, sebagai syarat ditetapkan Perpu dalam Pasal 22, dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945 sehingga Perpu tidak dikategori sebagai undang-undang darurat (emergency law).

Wewenang Presiden menetapkan Perpu termasuk kekuasaan yang tidak terbatas (unlimited powers) karena mengamputasi kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU, mengabaikan kewenangan konstitutional DPD, dan tanpa memberi ruang bagi partisipasi masyarakat Perpu. Selain itu, Perpu yang disetujui DPR berubah menjadi UU dan berlaku permanen, bertentangan dengan prinsip negara hukum, demokrasi dan paham konstitusionalisme. Semua Presiden tanpa kecuali, termasuk dua Pejabat Presiden, pernah mengunakan kewenangan ini, yang hingga tahun 2020 terdapat 216 Perpu.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the sole interpreter of the constitution kemudian menafsirkan berwenang menguji Perpu, sehingga dalam praktik ketatanegaraan saat ini, Perpu selain diawasi secara politik oleh DPR, juga secara hukum oleh MK. Buku ini menawarkan desain Perpu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai iuscontituendum.



Penulis:

Dr. Daniel Yusmic P. FoEkh (Hakim Konstitusi)

ISBN : 978-623-372-143-1

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 536 hlm Tahun : 2021 : IDR 213K Harga

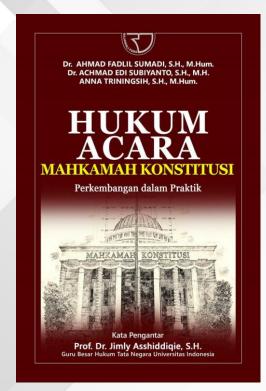




#### **HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### Perkembangan dalam Praktik





Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan tetapi juga melalui putusanputusannya. Buku yang berisi mengenai perkembangan hukum acara dalam praktik ini, layak untuk diketahui oleh mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum.

> Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Buku ini memberikan uraian yang lengkap mengenai Mahkamah Konstitusi dan hukum acara dalam lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi. Sangat perlu bagi siapa pun terutama pengacara dan kontestan serta akademisi yang ingin mengetahui Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Mahkamah Konstitusi bekerja melaksanakan wewenangnya.

> Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2013-2015)



#### Penulis:

Dr. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M.Hum. (Hakim Konstitusi 2010-2015) Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih

**ISBN** : 978-623-231-133-6

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 220 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 84K





#### WELFARE STATE VS GLOBALISASI GAGASAN NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA





Perkembangan gagasan Negara Kesejahteraan (welfare state) di tengah arus globalisasi dipaparkan secara gamblang. Kerangka pikir dengan pendekatan historis dan ditambah pengetahun teoretis yang mendalam, sangat membantu pembaca melacak perkembangan pemikiran paham Negara Kesejahteraan.

Hal paling mendasar yang hampir tidak ditemukan dalam buku-buku bertopik Negara Kesejahteraan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, buku ini seperti panduan untuk memahami secara utuh pertumbuhan dan perkembangan konsep Negara Kesejahteraan yang dikaitkan dengan perkembangan gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia.

Buku ini merupakan perkenalan awal tentang gagasan kesejahteraan yang tak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum administrasi negara, yang secara tak terhindarkan harus berhadapan dengan globalisasi. Melalui buku ini, Penulis memberikan uraian mendalam yang berkaitan dengan sejarah kelahiran, penggolongan, cakupancakupan program, maupun perkembangan terkini negara kesejahteraan.



Penulis:

Dr. I D.G. Palguna, S.H., M.Hum (Hakim Konstitusi 2003-2008 & 2015-2020)

ISBN : 978-623-231-094-0

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 272 hlm Tahun : 2019 : IDR 99K Harga





# **PELUNCURAN BUKU**

# **ULANG TAHUN KE-16 MAHKAMAH KONSTITUSI**











#### WELFARE STATE VS GLOBALISASI GAGASAN NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA





Perkembangan gagasan Negara Kesejahteraan (welfare state) di tengah arus globalisasi dipaparkan secara gamblang. Kerangka pikir dengan pendekatan historis dan ditambah pengetahun teoretis yang mendalam, sangat membantu pembaca melacak perkembangan pemikiran paham Negara Kesejahteraan.

Hal paling mendasar yang hampir tidak ditemukan dalam buku-buku bertopik Negara Kesejahteraan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, buku ini seperti panduan untuk memahami secara utuh pertumbuhan dan perkembangan konsep Negara Kesejahteraan yang dikaitkan dengan perkembangan gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia.

Buku ini merupakan perkenalan awal tentang gagasan kesejahteraan yang tak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum administrasi negara, yang secara tak terhindarkan harus berhadapan dengan globalisasi. Melalui buku ini, Penulis memberikan uraian mendalam yang berkaitan dengan sejarah kelahiran, penggolongan, cakupancakupan program, maupun perkembangan terkini negara kesejahteraan.

**Penulis** : Dr. I D.G. Palguna, S.H., M.Hum

(Hakim Konstitusi 2003-2008 & 2015-2020)

ISBN : 978-623-231-094-0

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 272 hlm Tahun : 2019 : IDR 99K Harga

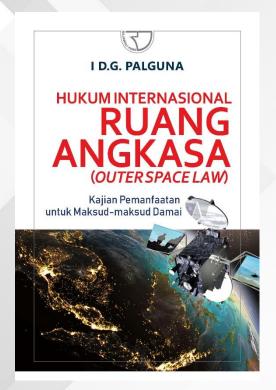




#### **HUKUM INTERNATIONAL RUANG ANGKASA** (OUTER SPACE LAW)

Kajian Pemanfaatan untuk Maksud-maksud Damai





Buku ini mengajak pembaca, khususnya para mahasiswa yang mengambil bidang studi hukum internasional, untuk memahami sejumlah pengetahuan dasar tentang hukum internasional yang berlaku di ruang angkasa (outer space law); asas-asasnya (terutama yang diatur dalam perjanjian internasional yang merupakan induknya, yaitu Space Treaty 1967); masalah-masalah krusial yang bertahun-tahun menjadi perdebatan baik antarsesama negara-negara space powers maupun antara negara space powers dan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia

Tentu saja disertai oleh pertarungan kepentingan yang melatarbelakanginya -yang kesemuanya menjadi dasar analisis bagi isu yang menjadi fokus utama buku ini, yaitu masalah demiliterisasi ruang angkasa dalam hubungannya dengan pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud-maksud damai (peaceful purposes).

**Penulis** : Dr. I D.G. Palguna, S.H., M.Hum

(Hakim Konstitusi 2003-2008 & 2015-2020)

**ISBN** : 978-623-231-095-7

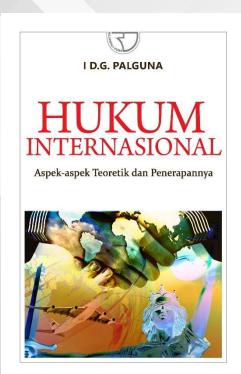
Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 186 hlm Tahun : 2019 : IDR 73K Harga





#### **HUKUM INTERNATIONAL** Aspek-aspek Teoretik dan Penerapannya





Dalam buku ini dibagi ke dalam tujuh bagian.

- (A) akan berbicara khusus tentang Doktrin Inkorporasi
- (B) secara khusus akan membicarakan Mahkamah Internasional (International Court of Justice), vang oleh Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai organ yudisial utama (principal judicial organ) PBB. Mahkamah Internasional, menurut statutanya, di samping memiliki kewenangan memutus sengketa atau perkara yang bersifat contentious sesuai dengan yurisdiksinya juga memiliki kewenangan konsultatif yaitu memberikan pendapat hukum (advisory opinion).
- (C) akan membahas materi hukum perjanjian internasional
- (D) pembahasan mengenai hukum diplomatik yang saat ini juga telah menjadi cabang hukum internasional tersendiri.
- (E) pembahasan mengenai salah satu masalah yang paling alot dalam mendapatkan kesepakatan negara-negara untuk dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu masalah tanggung jawab negara (state responsibility).
- (F) pembahasan mengenai hukum udara (air law) dan hukum ruang angkasa (space law atau outer space law)
- (G) topik yang dibahas adalah berkenaan dengan hukum laut internasional.

Penulis : Dr. I D.G. Palguna, S.H., M.Hum

(Hakim Konstitusi 2003-2008 & 2015-2020)

**ISBN** : 978-623-231-139-8

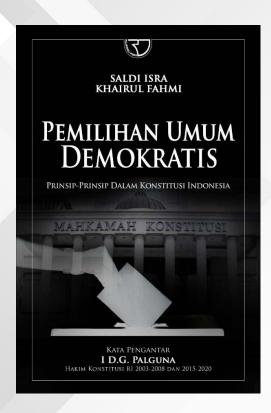
Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 330 hlm : 2019 Tahun : IDR 118K Harga





#### PEMILIHAN UMUM DEMOKRATIS PRINSIP-PRINSIP DALAM KONSTITUSI INDONESIA





Dalam berbagai putusannya, MK mengelaborasinya ke dalam prinsip-prinsip yang lebih operasional dalam menerjemahkan prinsip-prinsip umum demokrasi konstitusional yang dilaksanakan melalui pemilu ke dalam sejumlah prinsip penyelenggaraan pemilu yang lebih konkret. Peran MK tersebut jelas menjaga makna hakiki pemilu dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Buku ini berupaya melacak semangat putusan MK terkait dengan prinsipprinsip pemilu demokratis dalam UUD NRI 1945

Buku ini secara komprehensif dan runtut menjelaskan pemilu di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga pemilu tahun 2019, dengan disertai analisis yang tajam dan argumentatif. Buku ini lalu menjelaskan hal elementer yang acap kali luput dari perhatian, yaitu bahwa agar pemilu menjadi pengejawantahan demokrasi atau kedaulatan rakyat, pemilu itu sendiri harus demokratis.

**Penulis** : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

(Hakim Konstitusi)

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

**ISBN** : 978-623-231-132-9

Ukuran : 15 x 23 cm : 252 hlm Halaman Tahun : 2019 : IDR 94K Harga





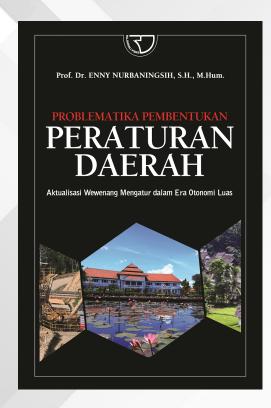




#### PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas





Buku Prof. Enny Nurbaningsih ini sangat komprehensif, kaya dan mencerahkan sehingga menjadi penting utk dibaca dan dijadikan rujukan baik di dunia riset dan pendidikan, maupun dalam praktik pembangunan, penerapan dan penegakan hukum yang terkait dengan peraturan daerah dim sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H.

Semangat melakukan demokratisasi dalam kehidupan politik pasca Reformasi 1998 membawa Indonesia ke pilihan politik "otonomi luas" dalam mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah. Konsekuensinya Daerah pun mempunyai kewenangan yang semakin kuat dan meluas rentangannya dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda). Tak jarang secara aktual hal tersebut memunculkan inkosistensi atau tumpang tindih, bahkan pertentangan, antara satu Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

Penulis : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

(Hakim Konstitusi)

ISBN : 978-623-231-150-3

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 300 hlm

 Tahun
 : 2019

 Harga
 : IDR 154K



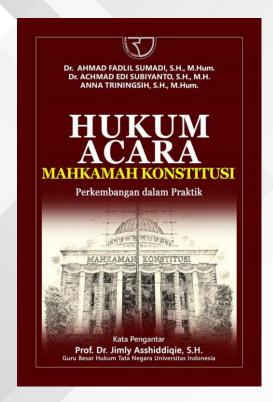




#### **HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### Perkembangan dalam Praktik





Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan tetapi juga melalui putusanputusannya. Buku yang berisi mengenai perkembangan hukum acara dalam praktik ini, layak untuk diketahui oleh mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum.

> Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Buku ini memberikan uraian yang lengkap mengenai Mahkamah Konstitusi dan hukum acara dalam lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi. Sangat perlu bagi siapa pun terutama pengacara dan kontestan serta akademisi yang ingin mengetahui Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Mahkamah Konstitusi bekerja melaksanakan wewenangnya.

> Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2013-2015)

**Penulis** : Dr. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M.Hum.

(Hakim Konstitusi 2010-2015)

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.Hum.

Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

**ISBN** : 978-623-231-133-6

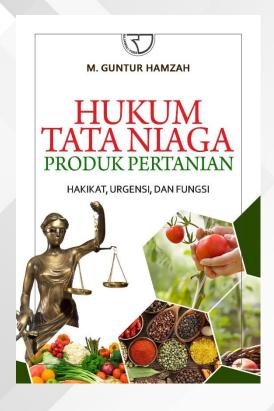
: 15 x 23 cm Ukuran Halaman : 220 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 84K





#### **HUKUM TATA NIAGA PRODUK PERTANIAN** HAKIKAT, URGENSI, DAN FUNGSI





Ada beberapa isu hukum menarik yang dapat ditarik pembaca. Salah satu yang perlu digarisbawahi di dalam buku ini adalah aturan-aturan hukum tata niaga produk pertanian di samping merupakan ramburambu (quidelines) bagi pelaksanaan tata niaga produk pertanian, juga sebagai sarana transformasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Aturan-aturan hukum itu, seyogianya dibentuk guna mengimplementasikan fungsi tata niaga produk pertanian yang berkeadilan sosial, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Buku ini juga diberikan rekomendasi penting guna mendukung dan membantu pelaku ekonomi, pemerintah, petani dan masyarakat pada umumnya dalam berinteraksi di bidang perdagangan dan ketataniagaan, juga untuk mendorong tata kelola produk pertanian yang meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya, serta masyarakat pada umumnya.

**Penulis** : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

(Sekretaris Jenderal MK RI)

**ISBN** : 978-623-231-142-8

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 300 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 72K





#### MAHKOTA MAHKAMAH KONSTITUSI BUNGA RAMPAI 16 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI





Dalam rangka ulang tahun Mahkamah Konstitusi (MK) yang ke-16, di tengah kesibukan penanganan ratusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, sejumlah pegawai MK menuangkan pemikiran dan gagasannya dalam kumpulan artikel yang kemudian dibukukan sebagai persembahan di hari lahir MK. Sejumlah 14 artikel terkumpul dan berisi beragam pemikiran yang tersaji di dalam buku ini.

Artikel-artikel ini telah dikelompokkan ke dalam empat bagian terpisah, yaitu: (1) Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang; (2) Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia; (3) Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme; serta (4) Mahkamah Konstitusi dan Sistem Peradilan.

Pembagian ini akan memudahkan bagi pembaca untuk memilih berdasarkan tema maupun topik yang dibahas. Ada benang merah yang dapat ditarik dari berbagai artikel tersebut, yakni hampir semuanya bermuara pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai suatu lembaga peradilan, putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi merupakan "Mahkota" pengadilan sehingga senantiasa harus terjaga murahnya.

Penulis : Pan Mohamad Faiz, Anna Triningsih,

**Achmad Edi Subiyanto** 

ISBN : 978-623-231-141-1

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 350 hlm

 Tahun
 : 2019

 Harga
 : IDR 121K



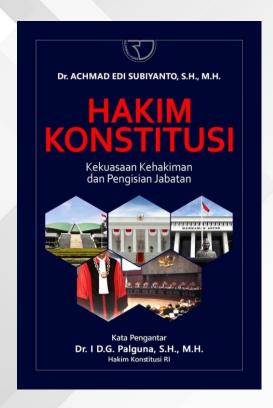




#### HAKIM KONSTITUSI

#### Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan





Meskipun UUD 1945 dan Undang-Undang melekatkan berbagai kekuasaan pada Mahkamah Konstitusi, tetapi secara substantif kekuasaan (dan tugas utamanya) adalah "menjamin agar asas, kaidah dan cita konstitusi dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya". Upaya memengaruhi atau menggeser independensi dan ketidakberpihakan hakim, tidak semata-mata pada saat memeriksa dan memutus perkara, melainkan termasuk pula dalam sistem rekrutmen, pengaturan jabatan, masa pemberhentian, dan penggajian.

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan MK dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara, yakni Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Buku ini dapat dijadikan bahan untuk menerima berbagai hasil kajian, terutama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi.

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

**Penulis** : Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

: 978-602-425-894-8 ISBN : 15 x 23 cm Ukuran

Halaman : 236 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 89K





### ETIK HAKIM KONSTITUSI

#### Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan





Dalam buku ini, diajukan dua postulat mengenai pentingnya rekonstruksi normatif sistem pengawasan etik Hakim Konstitusi, yaitu pertama, rekonstruksi normatif melalui Perubahan UUD 1945 dan kedua, rekonstruksi normatif melalui Perubahan UU Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu, juga dilakukan analisis mengenai evolusi sistem pengawasan etik hakim konstitusi, baik dari sisi norma maupun penegakannya. Dari hasil analisis tersebut, Penulis memberikan beberapa masukan dalam rangka rekonstruksi sistem pengawasan etik Hakim Konstitusi.

Hakim Konstitusi merupakan jabatan terhormat (officium nobile) dan mulia. Oleh karena itu, seorang hakim konstitusi berkewajiban memelihara kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku yang baik dalam rangka mempertahankan kehormatan dan kemuliaan yang disandangnya itu. Dalam perspektif inilah pengawasan etik yang dilakukan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangundangan terhadap hakim konstitusi memperoleh arti pentingnya.

> Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Hakim Konstitusi RI

**Penulis** : Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum

: 978-623-231-110-7 ISBN Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 328 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 119K

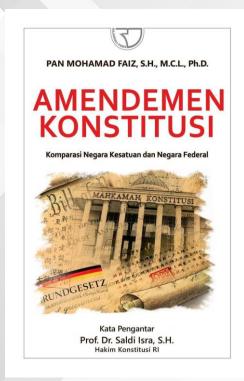




## AMENDEMEN KONSTITUSI







Konstitusi merupakan aturan mendasar yang mengatur fungsi dan kewenangan organ-organ negara serta hubungan antara negara dan rakyatnya.

Sebagaimana layaknya pohon yang hidup (living tree), konstitusi harus dapat terus tumbuh dan berkembang dengan mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, seluruh konstitusi yang terkodifikasi di dunia dapat dikatakan memiliki klausa amendemen yang mengatur mekanisme untuk mengamendemen formal konstitusi melalui jalur (verfassungsänderung).

Buku ini membahas secara mendalam mengenai amendemen konstitusi dari perspektif studi perbandingan di beberapa negara pilihan yang mewakili bentuk negara kesatuan dan federal.

Pembahasan ditulis begitu mengalir, tajam, dan padat informasi sebab bukan sekadar menguraikan perihal teori atau doktrin hukum semata, namun juga pengalaman nyata yang terjadi di negara-negara lain maupun yang dialami oleh Indonesia sendiri.

: Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. **Penulis** 

ISBN : 978-623-231-092-6

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 210 hlm Tahun : 2019 : IDR 81K Harga





#### HAK INGKAR HAKIM KONSTITUSI





Hak ingkar bukanlah hak untuk memilih hakim yang dikehendaki, melainkan hak untuk para pihak yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

Buku ini mencoba mengurai hak ingkar hakim konstitusi melalui pendekatan prinsip, mekanisme, dan contoh pelaksanaan, yang mana di Mahkamah Konstitusi walau belum diatur secara tegas, tetapi pelaksanaan hak ingkar sudah terjadi. Kondisi seperti ini bisa menjadi pintu masuk agar hak ingkar ini tidak dibiarkan melakukan metamorfosis yang tak terencana.

Buku ini bisa menjadi jawaban untuk menjadikan marwah hakim konstitusi semakin terjaga sekaligus menjadi raison d'être bahwa hak ingkar hakim konstitusi harus diatur dalam hukum acaranya.

: Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H. Penulis

ISBN : 978-623-231-135-0

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 200 hlm Tahun : 2019 : IDR 88K Harga





#### **DESAIN PENYELESAIAN SENGKETA** PEMILU SERENTAK





Dalam buku ini, dijelaskan mengenai konstruksi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 yang merupakan salah satu kewenangan MK sehingga menghasilkan suatu desain ideal penyelesaian pemilu serentak.

Dalam buku ini juga diuraikan mengapa Mahkamah Konstitusi memutus pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden dilaksanakan secara serentak serta bagaimana konsep ideal penyelesaian pemilu serentak.

Hal yang menjadi pesan yang ingin disampaikan oleh social engineering dalam buku ini ialah berikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga pelaksana dan penyelesaian sengketa pemilu untuk menegakkan pilar-pilar demokrasi sehingga MK benarbenar menyelesaikan mengenai hasil, bukan di luar hasil. Oleh karena itu, pelaksanan demokrasi berbasis demokrasi konstitusi.

**Penulis** : Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

**ISBN** : 978-623-231-109-1

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 392 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 129K

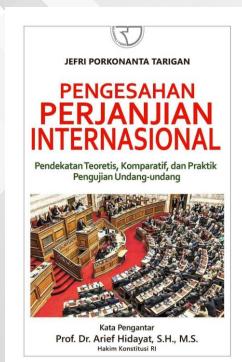




#### PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNATIONAL

Pendekatan Teoretis, Komparatif, dan Praktik Pengujian **Undang-undang** 





Buku ini bisa menjadi referensi terhadap pemahaman tentang pengesahan perjanjian internasional serta keterkaitannya dengan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

Buku ini menjadi salah satu gambaran bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menegakkan keadilan senantiasa dihadapkan pada isu-isu lintas bidang ilmu dan bukan hanya terfokus pada hukum tata negara semata. Dijelaskan pula bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang berhadapan dengan dinamika hukum internasional, khususnya berkaitan dengan keberadaan undangundang pengesahan perjanjian internasional.

Teori hukum internasional dan hukum tata negara tersaji dalam buku ini dengan menyertakan komparasi bentuk undang-undang pengesahan perjanjian internasional dibandingkan dengan bentuk undang-undang lainnya yang pada umumnya permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

: Jefri Porkonanta Tarigan **Penulis** 

ISBN : 978-623-231-115-2

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 200 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 88K









#### PENGHAYAT KEPERCAYAAN

#### Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi





Penganut Penghayat Kepercayaan telah ada sebelum Indonesia merdeka dan sampai saat ini keberadaannya diperkirakan berjumlah 12 juta.

Penghayat Kepercayaan memiliki hak konstitusional untuk secara bebas meyakini kepercayaannya sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dijamin, diakui, dan dilindungi oleh UUD 1945, namun ketentuan dalam UU Adminduk tidak tunduk kepada amanat UUD 1945 dengan tidak mencantumkan kolom Kepercayaan dalam KTP. Ketentuan itu menyebabkan kekuranglengkapan norma (incomplete norm) dalam UU Adminduk. Perlindungan hukum preventif dan represif bagi Penghayat Kepercayaan tidak maksimal karena adanya stigma peyoratif dan pemaknaan eksklusif atas kata "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "dan kepercayaannya itu" dalam peraturan perundang-undangan oleh Pembentuk UU dan Pelaksana UU (Penyelenggara Negara).

Buku ini berisi tentang konsep negara hukum dan keadilan sosial, penafsiran hukum dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan putusannya, dan bagaimana konsep keadilan sosial dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 - 2018 serta metode penafsiran keadilan sosial dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

**Penulis** : Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-231-114-5

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 390 hlm Tahun : 2019 : IDR 129K Harga



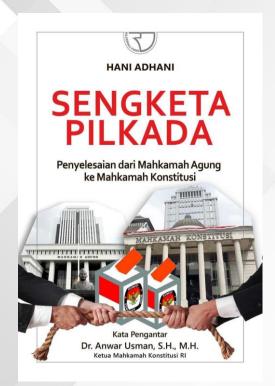




#### SENGKETA PILKADA

#### Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi





Layaknya sebuah karya ilmiah maka buku ini disajikan berdasarkan berbagai teori dan kajian secara ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan sengketa Pilkada. Buku ini menyajikan pula berbagai contoh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada di beberapa tempat yang dapat menjadi pertimbangan bagi penyempurnaan penyelenggaraan Pilkada di kemudian hari.

> Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. Hakim Konstitusi (2008 – 2018)

Sengketa pilkada yang merupakan bagian dari misi setiap kepentingan dalam sistem pemilu biasanya hanya layak jadi komsumsi para peminat hukum kenegaraan dan demokrasi, tetapi lewat analisis kritis dan ketepatan narasinya, buku ini jadi begitu penting dalam membangun kesadaran berkonstitusi.

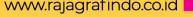
> Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, IPM. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis : Hani Adhani ISBN : 978-623-231-116-9

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 162 hlm Tahun : 2019 : IDR 76K Harga



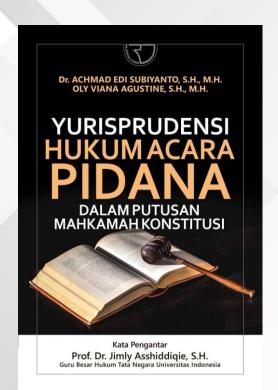






#### YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI





Buku ini berisi kumpulan putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi terkait dengan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari tahun 2003-2018.

Tidak dapat dipungkiri yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum penting di Indonesia, mengingat dalam hukum pidana sampai saat ini masih berlaku KUHAP yang merupakan warisan kolonial yang tentu memerlukan perubahan dengan mengikuti perkembangan masyarakat. Melalui kewenangannya melakukan pengujian undang-undang, MK berperan efektif dalam melakukan perubahan secara parsial KUHAP.

Buku ini akan membahas putusan-putusan yang telah menjadi yurisprudensi, yakni:

- 1. Putusan MK terkait dengan Perluasan Makna Saksi;
- 2. Putusan MK terkait dengan Peninjauan Kembali;
- 3. Putusan MK terkait dengan Praperadilan;
- 4. Putusan MK terkait dengan Kasasi;
- 5. Putusan MK terkait dengan Penangkapan;
- 6. Putusan MK terkait dengan Penyidikan, Penahanan dan Pemeriksaan Perkara;
- 7. Putusan MK terkait dengan Prapenuntutan.

: Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. Penulis

& Oly Viana Agustine, S.H., M.H.

: 978-623-231-136-7 **ISBN** 

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 252 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 102K





#### TAFSIR KONSTITUSI

#### Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma





Konstitusionalitas norma tidak dapat dilepaskan dari model pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Sepanjang satu dasawarsa, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa norma abstrak yang akan menjadi fokus pengujian dalam menilai konstitusionalitas norma undang-undang. Untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hal tersebut, buku ini mencoba untuk mengupas varian-varian putusan MK dalam menilai suatu perkara konstitusi yang memuat atau tidak aspek konstitusionalitas norma dan di sisi lain perkara yang lebih menitikberatkan pada implementasi atau penerapan norma.

Buku ini lahir dari hasil riset terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang 2003-2013 dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara materiil yang memfokuskan pada ratio decidendi (pertimbangan hukum) dan penafsiran hakim konstitusi dalam menentukan konstitusionalitas norma.

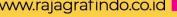
**Penulis** : Mohammad Mahrus Ali

ISBN : 978-623-231-138-1 Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 168 hlm Tahun : 2019 : IDR 76K

Harga





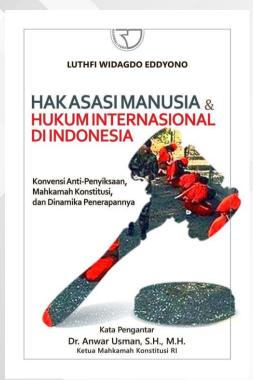




#### HAK ASASI MANUSIA & HUKUM INTERNATIONAL **DI INDONESIA**

RajaGrafindo Persada

Konvensi Anti-Penyiksaan, Mahkamah Konstitusi, dan Dinamika Penerapannya



Setiap 26 Juni diperingati sebagai "International Day in Support of Torture Victims". Penulisan buku ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali ada sebuah konvensi internasional yang sangat penting yang telah diterima secara global oleh hampir seluruh negara di dunia dan penerapannya perlu segera dilaksanakan pada level nasional di setiap negara.

Konvensi Anti Penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.

Buku ini juga memuat politik penerapan hukum internasional yang jelas terlihat dari adanya deklarasi dan reservasi dalam ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan oleh Indonesia serta dinamika hukum hak asasi manusia

**Penulis** : Luthfi Widagdo Eddyono

: 978-623-231-111-4 **ISBN** Ukuran : 15 x 23 cm

Halaman : 186 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 76K





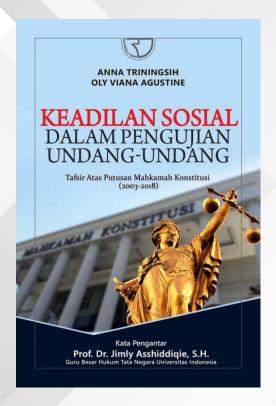




#### KEADILAN SOSIAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)





Buku ini secara lengkap membahas mengenai konsep dasar keadilan sosial baik dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila maupun penafsirannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis menginventarisasi dan mengualifikasikan putusan MK yang memuat tafsir keadilan sosial pada rentang waktu 2003-2018. Dari putusan yang telah diinventarisasi dan dikualifikasikan, Penulis menganalisis dengan penafsiran apa yang digunakan dalam mencari tafsir keadilan sosial tersebut.

Dalam pembahasannya, buku ini berisi tentang konsep negara hukum dan keadilan sosial, penafsiran hukum dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan putusannya, dan bagaimana konsep keadilan sosial dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003-2018 serta metode penafsiran keadilan sosial dalam putusan pengujian undangundang di Mahkamah Konstitusi.

**Penulis** : Anna Triningsih & Oly Viana Agustine

ISBN : 978-623-231-137-4

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 224 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 99K





#### KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk **Undang-undang** 



Proses perancangan undang-undang membutuhkan sebuah ruang yang menjamin kebebasan pembentuk undang-undang untuk menuangkan konsep maupun gagasannya. Apalagi jika rancangan dimaksud mengatur hal yang sama sekali baru.

Dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang, MK mengakui adanya ruang bebas bagi pembentuk undang-undang. Ruang demikian disebut sebagai "Kebijakan Hukum Terbuka" yang menempatkan semua rumusan norma undang-undang sebagai bernilai konstitusional selama tidak ada norma payung di dalam UUD 1945 yang dapat difungsikan sebagai parameter uji. Dengan kata lain, kekosongan norma dalam UUD 1945 menjelma sebagai ruang bebas bagi pembentuk undang-undang untuk secara manasuka menyusun materi undang-undang.

Buku ini menelisik konsep kebebasan pembentuk undang-undang yang dituangkan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, sekaligus melakukan kritik terhadap konsep dimaksud. Tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan konsep ideal mengenai kebebasan pembentuk undang-undang, serta menemukan parameter uji konstitusionalitas yang mampu membatasi kebebasan demikian

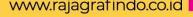
: Dr. Mardian Wibowo, S.H. **Penulis** 

: 978-623-231-099-5 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 428 hlm Tahun : 2019 : IDR 149K Harga





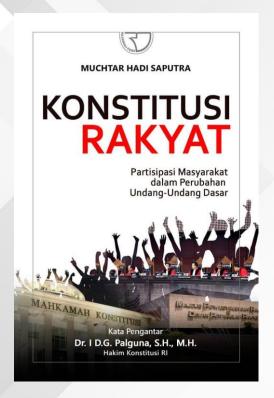




#### KONSTITUSI RAKYAT

#### Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar





Buku ini mengulas tentang bagaimana suatu konstitusi selayaknya Pentingnya pengaturan peran masyarakat dalam perubahan konstitusi dapat menjadi faktor penentu seberapa demokratisnya proses perubahan konstitusi dan substansi yang terkandung dalam konstitusi setelah perubahan tersebut.

Konstitusi merupakan hukum di suatu negara yang menjadi acuan dan parameter dalam pembentukan peraturan di bawahnya serta menjadi quidance dalam kehidupan bernegara. Arti penting ini menunjukkan konstitusi sedapat mungkin bersumber dari buah pikir masyarakat yang akan diaturnya. Sehingga bersamaan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang, maka selayaknya konstitusi dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masvarakat itu sendiri.

Walaupun UUD Tahun 1945 bagi Indonesia merupakan konstitusi yang keberadaannya telah diakui sebagai peraturan tertinggi -pundalam ketentuan Pasal 37 UUD Tahun 1945 sangat dimungkinkan terjadinya perubahan, sebagaimana yang terjadi pada perubahan (amendemen) hingga empat kali periode 1999-2002.

**Penulis** : Muchtar Hadi Saputra

ISBN : 978-623-231-096-4

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 182 hlm Tahun : 2019 Harga : IDR 72K

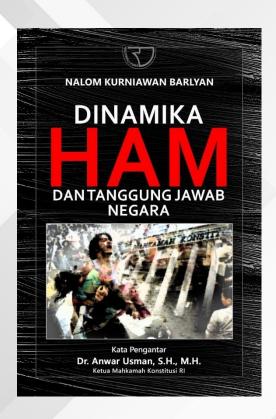






#### DINAMIKA HAM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA





Buku ini berupaya untuk memadukan antara sejarah dan perkembangan HAM, teori HAM, dan prinsip tanggung jawab negara ini. Pada hakikatnya paparan dalam buku ini lebih menekankan pada peran dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak asasi kepada warga negaranya sebab lahirnya sebuah negara yang merupakan kesepakatan tiada seluruh warga negara, lain bertujuan menyejahterakan dan melindungi hak-hak warga negara. Jika negara abai terhadap perlindungan hak warga negara, atau bahkan justru menjadi pelaku pelanggaran hak terhadap warga negaranya, tentulah hal tersebut bertentangan dengan tujuan kesepakatan warga negara dalam membentuk sebuah negara.

Sejarah telah memberikan catatan yang cukup panjang bahwa negara bisa saja abai terhadap hak-hak warga negaranya. Hal itu dapat disebabkan karena kebijakan yang bersifat politis, atau kekuasaan dapat pula karena arogansi vang ingin mempertahankan kedudukannya. pembaca lebih mudah untuk memahaminya.

**Penulis** : Nalom Kurniawan Barlvan

: 978-623-231-127-5 ISBN

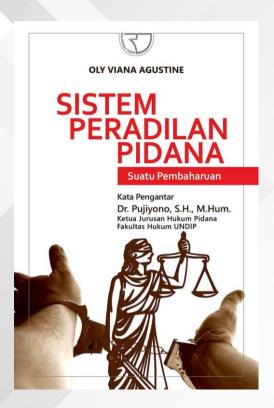
Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 194 hlm Tahun : 2019 : IDR 88K Harga





#### SISTEM PERADILAN PIDANA Suatu Pembaharuan





Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan tugas dan kewenangannya untuk melakukan uji materiil undang-undang terhadap konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa banyak perubahan terhadap politik hukum dan bekerjanya hukum di Indonesia tidak terkecuali hukum pidana.

Kekuatan buku ini terletak pada inventarisasi, sistematisasi dan analisis terhadap pembaharuan yang dihadirkan dari putusan MK terhadap perubahan politik hukum dan operasionalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan demikian, pembaca bisa melihat potret perubahan kebijakan formulasi (pembaharuan kebijakan perundangundangan) dan konsekuensi logis perubahan dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh struktur hukum/ kelembagaan hukum dalam sistem peradilan pidana.

**Penulis** : Oly Viana Agustine ISBN : 978-623-231-097-1

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 388 hlm Tahun : 2019 : IDR 137K Harga





# PELUNCURAN BUKU **ULANG TAHUN KE-17 MAHKAMAH KONSTITUSI**





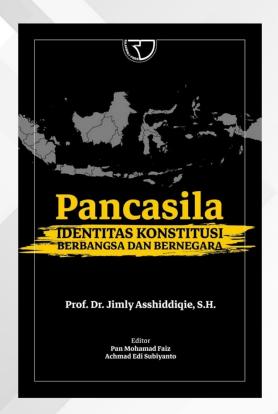






# PANCASILA: IDENTITAS KONSTITUSI BERBANGSA DAN BERNEGARA





Hidup berbangsa dan bernegara tidak lain merupakan kehidupan berkonstitusi. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi jiwa bagi identitas konstitusional bangsa Indonesia dengan lima prinsip dasar kebangsaan, vaitu: pluralisme, inklusivisme, dan universalisme. nasionalisme. konstitusionalisme berindentitas Pancasila. Sementara itu, pergulatan pengaruh nilai-nilai universal yang datang dari pengaruh globalisme versus lokalisme telah membentuk semangat kebangsaan, yaitu semangat nasionalisme Indonesia modern. Semangat nasionalisme itulah yang telah dituangkan meniadi kesepakatan tertinggi dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dokumen konstitusi berbangsa dan bernegara. Di dalam konstitusi tersebut terkandung banyak nilai-nilai fundamental yang bersifat universal. Namun, lima di antaranya sengaja dipilih dan disepakati oleh para pendiri bangsa dan negara sebagai lima sila yang disebut Pancasila sebagai identitas konstitusional bangsa Indonesia (constitutional identity).

Buku ini berisi percikan pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H., sang begawan hukum tata negara terhadap berbagai permasalahan aktual dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, konstitusi negara, kedaulatan negara, dan kelembagaan negara. Pandangan dan gagasan bernasnya yang tertuang di dalam buku ini layak untuk dibaca oleh siapa pun yang memiliki perhatian terhadap penerapan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003 - 2008)

ISBN: 978-623-231-521-1 Ukuran: 15 x 23 cm Isi: 480 hlm Tahun: 2020

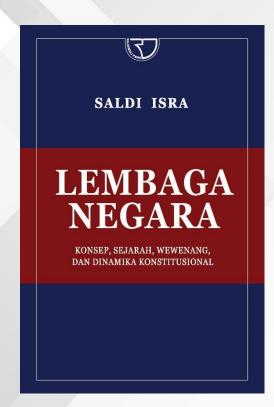
Harga : IDR 180K





# LEMBAGA NEGARA KONSEP, SEJARAH, WEWENANG, DAN DINAMIKA KONSTITUSIONAL





Pasca reformasi konstitusi (1999-2002), perubahan lembaga negara benar-benar menjadi "mata air" yang tidak pernah kering untuk terus ditimba para peminat dan pengkaji hukum tata negara.

Dibandingkan buku-buku lain dengan tema serupa yang berasal dari hasil olah pikir para pakar dan pengkaji hukum tata negara, buku ini berupaya mengambil dan menambahkan sisi lain yang acapkali diabaikan sebagian pakar atau pengkaji hukum tata negara. Sisi lain yang dimaksudkan adalah pelacakan konteks historis lembaga negara yang sebagiannya dipakai memotret wewenang dan dinamika lembaga negara terutama pasca reformasi konstitusi (constitutional reform) 1999-2002.

Tidak kalah menariknya, buku ini berupaya menjelaskan sejumlah kewenangan lembaga negara dikaitkan dengan putusan MK. Bentangan empirik setelah perubahan konstitusi, disadari atau tidak, putusan MK telah memberikan pengaruh atas lembaga negara. Sebagai bagian dari desain mekanisme *checks and balances*, putusan MK menghadirkan "dinamika konstitusional" tersendiri relasi antar-lembaga negara.

Penulis: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

(Hakim Konstitusi)

ISBN : 978-623-231-512-9

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 402 hlm

 Tahun
 : 2020

 Harga
 : IDR 132K

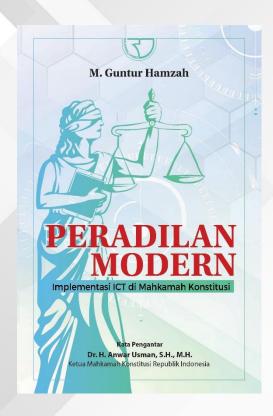






#### PERADILAN MODERN Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi





Mahkamah Konstitusi, sejak awal pendiriannya telah didesain untuk menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu kekuatan pendorong utama (main driving force) dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan modern. Saat ini, teknologi informasi telah menjadi tulang punggung pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak hanya pada sistem persidangan atau Justice Administration System (JAS) namun juga General Administration System (GAS).

Buku ini hadir untuk memperluas pengetahuan para pembaca dibidang peradilan modern berbasis ICT. Pembahasan dalam buku ini tidak hanya terbatas pada peradilan modern dalam hal teknologi informasi, tetapi juga modern dari segi mindset dan cultureset sumberdaya manusia di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, ICT tidak hanya dimaknai sebagai kepanjangan dari information, communication, and technology, tetapi juga merupakan akronim dari integrity, clean, and trust worthy.

**Penulis** : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

(Sekretaris Jenderal MK RI)

**ISBN** : 978-623-231-519-8

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 220 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 68K





#### HAK EKONOMI, SOSIAL, & BUDAYA

#### Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional





Buku ini membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dibentuk oleh konstitusi dan memiliki fungsi sebagai "the protector of human rights" yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia.

#### Buku ini antara lain mengulas:

- perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di dunia,
- pengaturan dan implementasi perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia,
- konsep perlindungan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh peradilan konstitusional dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung HAM melalui judicial review,
- bagaimana peradilan konstitusional dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berperan dalam pemenuhan dan perlindungan hakhak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia, dan
- analisis terhadap seluruh putusan yang telah dikaji tersebut, berdasarkan analisis terhadap karakteristik implikasi putusan terhadap perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia.

**Penulis** : Oly Viana Agustine

Muhammad Reza Winata

**ISBN** : 978-623-231-507-5

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 282 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 109K

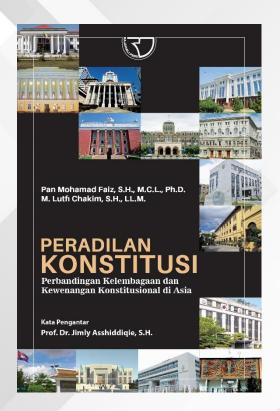




#### PERADILAN KONSTITUSI

#### Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia





Dibandingkan dengan karya akademik lain yang beredar, kelebihan dan sekaligus kekuatan dari buku ini, Penulis tidak berhenti sampai perbandingan kelembagaan dan kewenangan, tetapi juga menyertakan putusan monumental (*landmark decisions*) sejumlah negara Asia. Bagi Indonesia, in casu Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan tersebut dapat menjadi tambahan referensi dalam pemecahan masalah-masalah konstitusional serupa yang terjadi di Indonesia

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Hakim Konstitusi RI

Kekuatan lain dari buku ini terletak pada sumber acuan yang memiliki otoritas tinggi karena ditulis oleh para pakar hukum tata negara ataupun perbandingan yang mumpuni dari berbagi belahan dunia.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran

Penulis : Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

M. Lufti Chakim, S.H., LL.M.

ISBN : 978-623-231-510-5

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 270 hlm

 Tahun
 : 2020

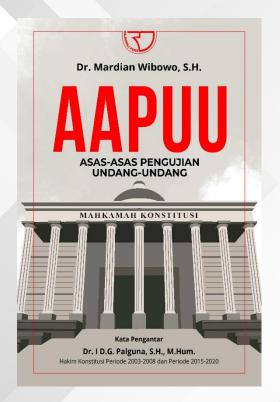
 Harga
 : IDR 118K





#### **AAPUU** ASAS-ASAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG





Buku ini menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang. Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di MK. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU itu sendiri, diawali dari asas-asas yang tertulis dalam UU MK, tertulis dalam UU Kekuasaan Kehakiman, serta asas-asas yang tidak tertulis namun hadir melalui praktik dan putusan MK.

> Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Hakim Konstitusi RI, Guru Besar FH UGM

Buku ini merupakan sumbangsih penulisnya bagi pendidikan hukum sekaligus bagi praktisi hukum, bahkan pembentuk undang-undang. Karena itu, saya merekomendasikan buku ini dimasukkan sebagai referensi dalam perkuliahan di fakultasfakultas hukum di seluruh tanah air, sekaligus sebagai materi ajar dalam pendidikan khusus profesi advokat untuk mata ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

> Dr. I D.G. Palguna, S.H., M.Hum. Hakim Konstitusi RI (2003-2008 & 2015-2020)

: Dr. Mardian Wibowo, S.H. **Penulis** 

: 978-623-231-420-7 **ISBN** 

: 15 x 23 cm Ukuran Halaman : 224 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 85K

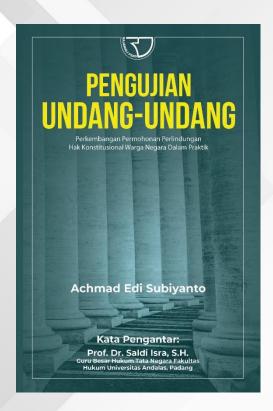




#### PENGUJI UNDANG-UNDANG







Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945.

Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, MK perlu melakukan penafsiran terhadap norma-norma yang ada dalam UUD 1945 sebagai dasar memeriksa dan memutus perkara konstitusional.

Fungsi MK dalam melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara yang dijamin dalam Konstitusi. Pengaduan konstitusional adalah bagian dari upaya untuk memberi perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional dan hak dasar warga negara.

**Penulis** : Achmad Edi Subiyanto

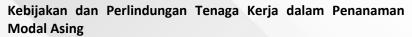
: 978-623-231-520-4 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm : 176 hlm Halaman Tahun : 2020 : IDR 68K Harga





#### HUKUM KETENAGAKERJAAN







Pemerintah harus bisa memastikan kualitas tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan para tenaga kerja asing yang hendak bekerja. Untuk itu, diperlukan konsistensi pemerintah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia.

Agar perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia mendapat posisi yang sama dengan tenaga kerja asing di Indonesia, maka seharusnya pemerintah memperketat peraturan mengenai hal ini dengan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan penanaman modal asing yang berada di Indonesia apabila tidak mengikuti peraturan yang telah ada. Sedangkan bagi perusahaan penanaman modal asing yang telah ada, diharuskan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia dengan melakukan sistem recruitment yang sesuai kualifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia serta mengadakan pelatihan, training, dengan tidak mendiskriminasikan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaannya.

Untuk tenaga kerja Indonesia sendiri, agar mendapat perlindungan hukum yang sama dengan tenaga kerja asing, agar meningkatkan kemampuan soft skill dan pengetahuan, serta menaati peraturan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku di Indonesia.

: Anna Triningsih Penulis ISBN : 978-623-231-516-7

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 180 hlm Tahun : 2020 : IDR 70K Harga

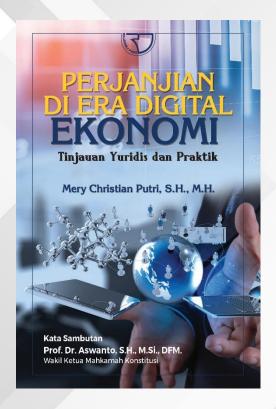




#### PERJANJIAN DI ERA DIGITAL EKONOMI

Tinjauan Yuridis dan Praktik





Buku ini telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perjanjian sebagai dampak dari digitalisasi ekonomi.

Buku ini setidaknya memberikan beberapa konklusi dari ulasanulasan yang ada.

Pertama, iktikad baik dalam perjanjian, baik itu prakontrak maupun pelaksanaan kontrak mutlak harus dimiliki oleh kedua belah pihak yang berniat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Asas iktikad baik dapat menjadi shield yang melindungi para pihak (khususnya nasabah dalam berbagai praktik kontrak yang diuraikan di buku ini) dari adanya probabilitas pelanggaran hak atau dirugikannya kepentingan para pihak tersebut.

Kedua, tidak adanya iktikad baik dalam perjanjian mengakibatkan sebuah perjanjian batal demi hukum yang berimplikasi perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau perjanjian dapat dibatalkan demi hukum yang berarti salah satu pihak harus melakukan upaya hukum demi batalnya suatu perjanjian akibat tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian (iktikad baik).

Penulis : Mery Christian Putri, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-231-496-2

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 216 hlm

 Tahun
 : 2020

 Harga
 : IDR 85K

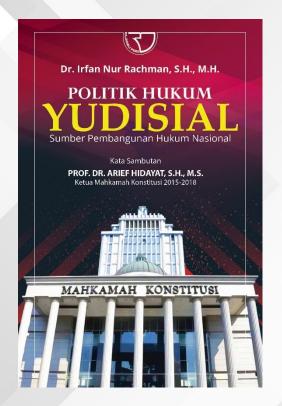




#### POLITIK HUKUM YUDISIAL

#### **Sumber Pembangunan Hukum Nasional**





Hal yang menurut saya menarik dalam buku ini adalah gagasan penulis yang memosisikan putusan MK berada sedikit di bawah atau sejajar dengan Undang-Undang Dasar sehingga dalam konteks ini penulis menyamakan putusan MK sebagai politik hukum dasar karena putusan MK memuat tafsir konstitusional atas Undang-Undang Dasar.

Tak jarang pula putusan MK memberikan pedoman dan arahan kepada pembentuk undang-undang terkait pembentukan hukum ke depan (ius constituendum) agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Pada titik inilah Penulis menggambarkan bahwa MK melalui putusannya berperan dalam pembentukan hukum melalui "politik hukum yudisial" yang termuat dalam putusannya. Tidak hanya itu, Penulis juga membahas implikasi pengabaian putusan MK oleh pembentuk undang-undang yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara dan menunda tercapainya keadilan (justice delayed, justice denied).

Di akhir buku ini, Penulis menawarkan gagasan yang sangat penting, yakni bagaimana melakukan pembangunan hukum nasional berbasis pada putusan MK.

> Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2015-2018)

: Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. Penulis

: 978-623-231-505-1 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 336 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 130K





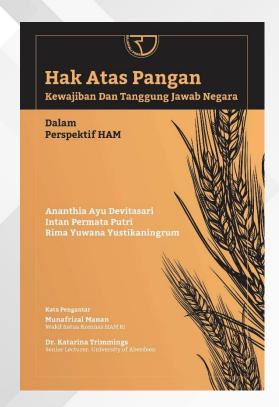




#### HAK ATAS PANGAN

#### Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM





Literatur di Indonesia yang khusus membahas tema tentang Hak atas Pangan dan Ketahanan pangan masih sangat sedikit, padahal pangan merupakan permasalahan mendasar terpenuhinya kebutuhan manusia.

Buku ini hadir dan mencoba menjawab terkait Hak atas Pangan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan untuk warga negaranya. Buku ini hadir dalam 4 (empat) bagian yakni:

- prospektus dan nilai penting hak atas pangan;
- konsep dan batasan hak atas pangan;
- kewajiban negara dalam perwujudan hak atas pangan; dan
- pemenuhan hak atas pangan di indonesia dan berbagai negara.

Pembahasannya juga meliputi komparasi atas pemenuhan hak atas pangan di berbagai negara seperti Argentina, Azerbaijan, Zimbabwe, Italia, dan Afrika Selatan untuk melihat kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah setempat dalam memenuhi ketahan pangan pada masing masing negara.

: Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Penulis

Putri, Rima Yuwana Yustikaningrum

: 978-623-231-497-9 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 228 hlm : 2020 Tahun : IDR 89K Harga





#### DINAMIKA KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA





Membicarakan konstitusionalisme tentu harus mengaitkannya dengan hukum konstitusi yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks perkembangannya, konstitusionalisme tidak berada di ruang hampa. Terdapat dinamika yang bernilai akademis untuk diamati karena pandangan para ahli tentu tidak sama dan serupa.

Buku ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai isu penting konstitusionalisme dalam kerangka hukum konstitusi yang berlaku di Indonesia. Perspektif sejarah dan praktik perkembangan masa kini juga diamati dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang kerap berulang baik karena disengaja maupun karena terjadi apa adanya.

Buku ini memuat berbagai pandangan ahli hukum konstitusi yang memiliki otoritas akademik. Selain itu, untuk melihat secara konstekstual pandangan ahli buku ini mengaitkannya dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan dinamika konstitusionalisme benar-benar terjadi tidak hanya pada tataran akademis tetapi juga karena ditemukan persoalan di masyarakat.

Penulis : Luthfi Widagdo Eddyono

ISBN : 978-623-231-502-0

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 194 hlm

 Tahun
 : 2020

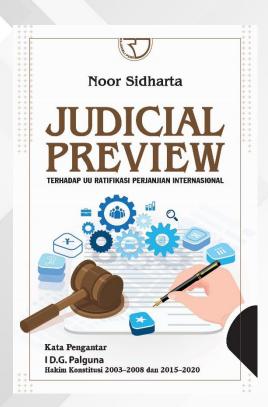
 Harga
 : IDR 75K





#### JUDICIAL PREVIEW TERHADAP UU RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNATIONAL





Pengujian Undang Undang (Judicial Review) No. 38/2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations kepada Mahkamah Konstitusi, menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Masalah itu adalah UU Ratifikasi Perjanjian Internasional ternyata masih bisa di judicial review melalui Mahkamah Konstitusi.

Melihat persoalan yang dilematis antara hukum nasional dan hukum internasional ini maka penulis untuk menggagas sebuah konsep yang dapat menjadi jalan tengah antara hukum tata negara (bidang perundang-undangan) dan hukum Internasional. praktik ketatanegaraan vakni Suatu baru Judicial Preview terhadap rancangan undang-undang ratifikasi dapat menjadi solusi untuk efektivitas proses ratifikasi pengundangan Perjanjian Internasional.

Judicial Preview terhadap RUU Ratifikasi perjanjian internasional adalah suatu tindakan untuk mengkaji substansi dari isi perjanjian internasional apakah sudah bersesuaian dengan konstitusi, perundang-undangan kepentingan nasional dan kebijakan pemerintahan, sebelum disahkan menjadi UU.

**Penulis** : Noor Shidarta **ISBN** : 978-623-231-518-1

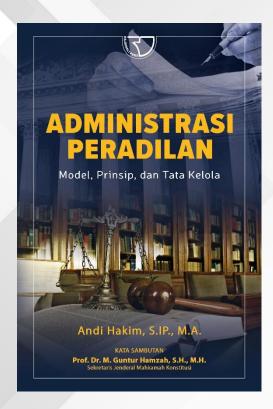
: 15 x 23 cm Ukuran Halaman : 252 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 98K





#### ADMINISTRASI PERADILAN Model, Prinsip, dan Tata Kelola





Buku ini membahas dinamika independensi organisasi peradilan yang trennya menunjukkan kondisi yang semakin otonom dan independen di berbagai negara, terutama dalam hal pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan yang terpenting adalah soal anggaran lembaga peradilan yang sering menjadi objek perselisihan dan tarik-menarik kepentingan antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan legislatif.

Dalam buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai manajemen peradilan, baik dalam manajemen organisasi maupun manajemen perkara disertai dengan strateginya. Dan yang juga sangat penting di akhir bagian buku ini dibahas mengenai penerapan prinsip dan tata kelola lembaga peradilan yang baik (good court governance).

Buku ini dapat menjadi referensi akademik, baik bagi mahasiswa hukum, ilmu administrasi, dan jurusan lainnya yang berminat mendalami kajian organisasi peradilan. Selain itu, buku ini juga penting untuk dibaca dan dikaji oleh para praktisi hukum, lawyer, aktivis hukum, dan utamanya bagi para administrator peradilan dan tidak terkecuali bagi para hakim dalam memahami kebijakan, sistem, dan model, serta prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lembaga peradilan di berbagai negara.

**Penulis** : Andi Hakim, S.IP., M.A.

ISBN : 978-623-231-483-2

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 202 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 80K





#### **ASAS RETROAKTIF**

#### Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik





Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut).

Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimbangkannya dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian. Hakim harus menimbang bobot keadilan dan kepastian agar seimbang. Sebab, akibat hukum putusannya tidak hanya mengikat Pemohon dan Addressat putusan saja, melainkan juga mengikat seluruh warga negara. Ditambah lagi, putusan retroaktif ini secara teoretis berpotensi menciptakan disharmoniasasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Meskipun secara teoritis dan yuridis putusan retroaktif sebenarnya dilarang, namun bukan berarti MK tidak boleh mempraktikannya. Setiap teori pasti ada pengecualiaannya dan setiap pengecualian sudah pasti ada teori yang dasarnya. Misalnya karena alasan perlindungan HAM, alasan keadilan substantif, dan alasan diskresi dari hakim.

Penulis : Zaka Firma Aditva ISBN : 978-623-231-500-6

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 218 hlm Tahun : 2020 : IDR 85K Harga





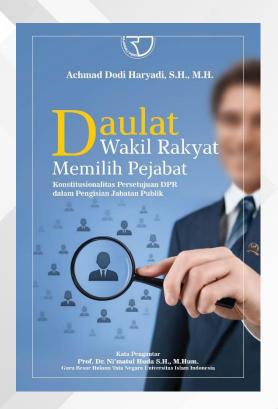




#### DAULAT WAKIL RAKYAT MEMILIH PEJABAT

#### Konstitusionalitas Persetujuan DPR dalam Pengisian Jabatan Publik





Pengisian jabatan publik merupakan sesuatu yang menarik untuk diamati dan ditelisik. Sebab, proses pengisian atau rekrutmen jabatan publik akan sangat berkorelasi dengan seberapa profesional, akuntabel, dan baik kinerja sebuah institusi nantinya. Jika prosedur penentuan jabatan publik saja sudah sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pragmatis dan oportunis, maka jangan salahkan jika suatu lembaga nantinya akan diisi oleh orang-orang yang tidak kapabel dan tidak memiliki kompetensi di bidang yang akan didudukinya. Apalagi institusi yang dimaksud adalah institusi dalam bidang hukum. Mekanisme rekrutmen pengisian jabatannya akan menjadi titik yang sangat krusial untuk dikupas.

Buku ini bermanfaat bagi para pemerhati hukum, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai hukum, khususnya seluk-beluk proses rekrutmen jabatan publik di Indonesia.

Penulis : Achmad Dodi Haryadi, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-231-522-8

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 244 hlm

 Tahun
 : 2020

 Harga
 : IDR 95K



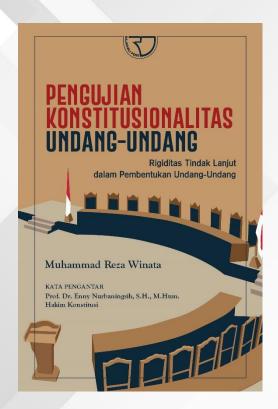




#### PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-undang





Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan fundamental yang diadopsi dalam institusi peradilan kontemporer berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kewenangan pengujian undang-undang inilah yang sering disebut sebagai "mahkota" Mahkamah Konstitusi, dikarenakan urgensitas fungsi kewenangan ini dalam mengawal pembentukan sistem hukum di Indonesia agar selalu konsisten dengan norma, nilai, dan semangat dalam konstitusi, sekaligus menjamin checks and balances di antara lembaga negara.

Analisis buku ini akan berfokus mengkaji anomali praktik fleksibilitas tindak lanjut berdasarkan karakteristik dan faktor penyebab pengesampingan putusan, serta alasan terjadinya distorsi pembaruan validitas norma oleh pembentuk undangundang.

Pembahasan buku ini diakhiri dengan telaah korelasi tindak lanjut putusan pengujian undang-undang dalam pembentukan undangundang dari perspektif konsep konstitusi yang hidup (living constitution) dan dialog konstitusional (constitutional dialogue) antara lembaga negara.

: Muhammad Reza Winata Penulis

ISBN : 978-623-231-506-8

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 238 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 93K



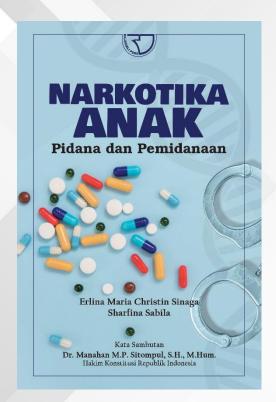




### NARKOTIKA ANAK

#### Pidana dan Pemidanaan





Penyalahgunaan narkotika bukan lagi hal yang baru di Indonesia. Bahkan kejahatan narkotika disebut kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena jaringan peredaran sangat luas lintas batas negara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang luar biasa juga untuk menanggulanginya.

Salah satu yang menjadi permasalahan serius adalah ketika anak ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Seperti diketahui Undang-Undang tentang Narkotika tidak mengatur ketentuan secara khusus terkait anak sebagai subjek hukum khusus dalam tindak pidana narkotika.

Buku ini mengulas seputar pola pemidanaan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam buku ini juga dikaji beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang tentang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta analisis berbagai instrumen hukum internasional terkait.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru yang komprehensif dalam pola penegakan tindak pidana narkotika terhadap anak serta kebaruan sistem penegakan hukum pidana anak di masa mendatang.

Penulis : Erlina Maria Christin Sinaga

**Sharfina Sabila** 

ISBN : 978-623-231-498-6

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 206 hlm

 Tahun
 : 2020

 Harga
 : IDR 80K





#### PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA





Buku ini membahas mengenai isu-isu menarik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa isu dibahas secara tuntas dengan memperdalam bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Berbagai alternatif upaya pemberantasan korupsi ditawarkan baik secara represif maupun preventif.

Kelima pokok pembahasan telah diinventarisasi dan di-update dengan situasi dan kondisi pemberantasan korupsi saat ini. Beberapa variabel yang menjadi bahan pembaruan data dan bahan yakni adanya beberapa perubahan undang-undang seperti undang-undang Perlindungan saksi dan korban serta dimuatnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang terkait dengan undang-undang pencucian uang dalam rangka menjalankan mekanisme retitutio of unjust enrichment dalam tindak pidana korupsi.

Penulis : Oly Viana Agustine

ISBN : 978-623-231-495-5

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 244 hlm

 Tahun
 : 2020

 Harga
 : IDR 95K





#### PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA DEMOKRATIS

Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung





Pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selalu menjadi bahan perbincangan dan diskusi yang menarik baik oleh masyarakat, akademisi, dan juga politisi.

Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah sempat dilakukan oleh anggota DPRD. Pelaksanaan proses demokrasi tidak langsung tersebut dilakukan sebelum amendemen konstitusi. Kini setelah amendemen konstitusi, pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh rakvat.

Buku ini dapat menjadi salah satu referensi untuk kembali membuka lembaran sejarah proses demokrasi lokal yang bernama Pilkada yang telah ada sebelum amendemen konstitusi dan juga memberikan warna baru dalam perspektif konstitusi tentang bagaimana menata kembali pelaksanaan Pilkada yang paling ideal untuk bangsa dan negara Indonesia yang sejalan dengan semangat demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

**Penulis** : Hani Adhani, S.H., M.H.

: 978-623-231-504-4 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 192 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 75K



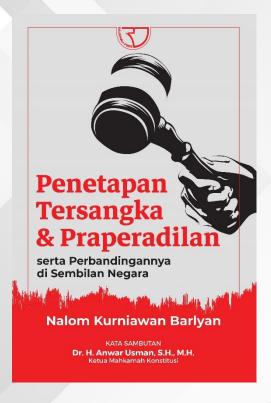




#### PENETAPAN TERSANGKA & PRAPERADILAN

serta Perbandingannya di Sembilan Negara





Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Namun di dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan hak konstitusional warga negara.

Semula, tidak ada forum hukum untuk menguji keabsahan suatu penetapan tersangka, hingga akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka, sebagai salah satu objek dari praperadilan. Namun demikian, meski telah tersedia forum hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, masih terdapat berbagai problem hukum yang mengiringi pelaksanaannya.

Mengingat bahwa pelaksanaan praperadilan untuk penetapan tersangka masih berlandaskan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat abstrak, sedangkan hukum acara praperadilan merupakan hukum formil yang diatur dalam hukum acara pidana, maka tulisan ini berupaya untuk melihat secara teoretis, praktik, serta perbandingannya dengan beberapa negara lain, dalam rangka memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negara serta perbaikan hukum acara pidana di masa yang akan datang.

Penulis : Nalom Kurniawan Barlyan

ISBN : 978-623-231-514-3

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 288 hlm

 Tahun
 : 2020

 Harga
 : IDR 112K





#### PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI

Dewan Perwakilan Daerah





Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bicameral). Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem "double check" yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat.

Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam konstitusi dan peraturan perundangan membuat DPD mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 92/PUU-X/2012. Putusan 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan legislasi DPD yang setara dengan DPR dan Presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi dari putusan tersebut. Termasuk saat revisi Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tanpa mengadopsi usulan DPD dalam hal penguatan fungsi legislasinya. Bahkan hingga revisi tersebut disahkan, tetap saja usulan DPD tersebut diabaikan.

Buku ini memaparkan upaya penguatan fungsi legislasi DPD Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yaitu melalui amandemen kelima konstitusi dan operasional penataan lembaga serta meningkatkan kemampuan para anggota

Penulis : Agung Dian Onita : 978-623-231-508-2 ISBN

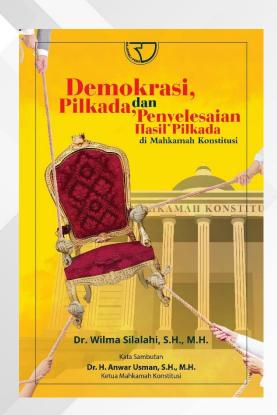
: 15 x 23 cm Ukuran Halaman : 244 hlm Tahun : 2020 : IDR 95K Harga





#### DEMOKRASI, PILKADA, DAN PENYELESAIAN HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI





Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memilih pemimpin dilaksanakan secara demokratis yaitu melalui Pemilihan baik di pusat maupun di daerah.

Pemilihan merupakan syarat minimal penyelenggaraan suatu democratic system. Para pemimpin di daerah provinsi, kabupaten. dan kota dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil, dan berkala. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung (demokratis) dan pemilu serentak oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Untuk itu, demi menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, persyaratan dan tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam buku ini penulis menyajikan bagaimana demokrasi dan hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak dalam pelaksanaan Pemilihan yang demokratis dengan mengedepankan prinsip transparency, accountable, have integrity, serta to be responsible sehingga pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan berkeadilan (sense of justice) tercapai.

**Penulis** : Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-231-499-3

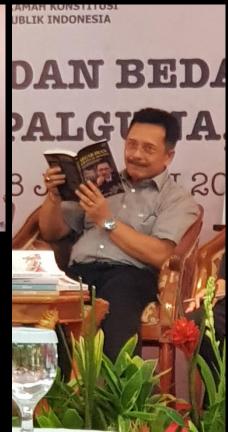
Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 224 hlm Tahun : 2020 Harga : IDR 88K















#### NEGARAWAN DARI PULAU DEWATA Bunga Rampai Tulisan Kolega Dan Sahabat I D.G. Palguna





Berbagai pandangan dan kisah dari mereka yang berinteraksi langsung setiap harinya dengan Hakim Palguna, baik pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menjadi kesaksian atas wujud pengabdian Hakim Palguna.

Implementasi atas jiwa yang terbentuk dari lingkungan religius dan berseni budaya di Pulau Dewata telah terpancarkan dalam tiap langkahnya.

Buku ini sangat menarik dibaca untuk memahami pribadi Sang Negarawan I D.G. Palguna, menelusuri jejak kiprah dan pemikirannya selama menjadi Hakim Konstitusi, juga sisi lain beliau yang jarang diketahui publik. Kisah dan kesaksian dalam buku ini sungguh sarat akan inspirasi.

Editor : Pan M. Faiz, Anna T., Achmad Edi S.

ISBN : 978-602-1288-57-3 Ukuran : 13.5 X 23.5 cm Halaman : 274 hlm Tahun : 2020

: IDR 112K

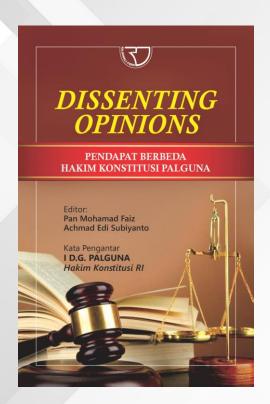






#### **DISSENTING OPINIONS** Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna





Dalam buku setebal 262 halaman ini telah tersaji 14 dissenting opinions yang pernah ditoreh Palguna dalam berbagai perkara pengujian UU yang diputus MK.

Dari dissenting opinions tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menjadi pendapat yang digunakan atau diikuti oleh MK di masa mendatang. Tidak tertutup kemungkinan pula dissenting opinions ini setidaknya membuka wacana dan diskursus akademik baru di berbagai kampus dan forum-forum ilmiah di Indonesia.

Kompilasi dissenting opinions ini bukti nyata bahwa Palguna memiliki pendirian kuat atas pendapatnya saat rapat permusyawaratan hakim ketika sudah tidak dapat lagi menemukan kesamaan titik pandang. Dengan membaca gaya bahasa dan penulisan dari 14 dissenting opinions ini dapat ditemukan petunjuk sejauh mana Palguna turut memberi kontribusi dan warna dalam putusan-putusan MK. Diantara dissenting opinions ini ada yang diuraikan dan penjelasannya sama panjang atau bahkan lebih panjang dibandingkan dengan pendapat hukum Mahkamah.

: Pan Mohamad Faiz & Achmad Edi Subiyanto Editor

ISBN : 978-979-623-231-274-6

Ukuran : 13.5 X 23.5 cm Halaman : 262 hlm Tahun : 2020 : IDR 108K Harga





#### MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA POLITIK HUKUM DIINDOENSIA





Perubahan UUD 1945 yang terjadi di era reformasi telah mengubah secara fundamental politik hukum Indonesia. Secara umum, politik hukum diartikan sebagai hukum yang dicita-citakan atau yang dianganangankan berlaku di masa yang akan datang, dan bukan hukum yang dibuat semata-mata untuk melayani kepentingan politik. Permasalahannya, masih banyak penyelenggara negara ataupun masyarakat kebanyakan yang belum sepenuhnya memahami politik hukum yang terkandung di dalam UUD 1945.

Buku ini memuat pembahasan secara komprehensif mengenai berbagai isu hukum dan konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan arah politik hukum di Indonesia pasca-reformasi.

Beberapa fokus pembahasannya terletak pada Mahkamah Konstitusi, demokrasi, dan pembangunan hukum dalam kerangka spirit UUD 1945 guna mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi berdasar atas hukum (constitutional democratic state).

Buku ini ditulis oleh I D.G. Palguna, pakar hukum dan konstitusi yang terlibat langsung dalam pembahasan proses perubahan UUD 1945 di MPR RI serta menjadi Hakim Konstitusi selama dua periode (2003-2008 dan 2015-2020).

Penulis: Dr. I D.G. Palguna, S.H., M.Hum

(Hakim Konstitusi 2003-2008 & 2015-2020)

ISBN : 978-623-231-275-3
Ukuran : 15.5 X 23.5 cm
Halaman : 326hlm
Tahun : 2020
Harga : IDR 126K





### PELUNCURAN BUKU

## **ULANG TAHUN KE-18 MAHKAMAH KONSTITUSI**





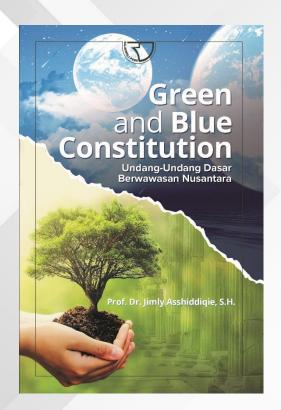




#### GREEN AND BLUE CONSTITUTION

## **Undang-undang Dasar Berwawasan Nusantara**





Buku ini hadir untuk melanjutkan misi buku sebelumnya, yaitu Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945 dan telah ditambahkan dengan perkembangan-perkembangan baru dan juga perspektif sejarah yang lebih banyak.

Dalam buku ini, ditambahkan mengenai pengalaman bangsa Jerman dengan Konstitusi Bayaria tahun 1946 yang terkait dengan upaya membangun prinsip keseimbangan lingkungan dalam kehidupan bersama dalam wadah bernegara. Konstitusi Bavaria merupakan konstitusi pertama yang memuat pasal-pasal eksplisit mengenai gagasan perlindungan lingkungan hidup yang dewasa ini menjadi kesadaran umum umat manusia di seluruh dunia.

Selain itu, tentunya dalam buku ini juga ditambahkan pembahasan mengenai gagasan konstitusi biru. Gagasan Green and Blue Constitution dikaji dengan memperluas pengertian tentang konsep wilayah Negara Indonesia yang berdaulat, tidak hanya mencakup daratan dan perairan, tetapi juga wilayah udara, ruang angka, dan bahkan kawasan luar angkasa yang sangat penting untuk dijangkau dalam kerangka konstitusionalisme kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

**Penulis** : Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H.

(Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008)

**ISBN** : 978-623-372-136-3

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 202 hlm Tahun : 2021 : IDR 93K Harga

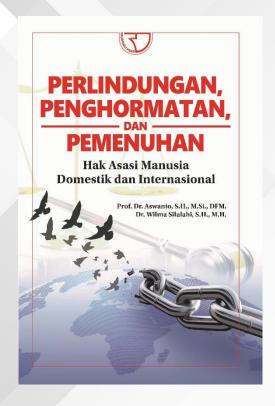




## PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN DAN PEMENUHAN

Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional





Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta meletakkan hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang, hak asasi ada yang diperoleh langsung sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang bersumber dari negara. Namun, dalam pelaksanaan di kehidupan keseharian masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah dan dunia internasional waiib menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa diskriminasi sebagai kodrat manusia. Pemerintah, dalam fungsinya terhadap usaha penegakan hak asasi manusia tampil sebagai guardians of human rights, artinya pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang kondusif agar apa yang menjadi hak asasi manusia dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa diskriminasi.

Perkembangan hak asasi manusia dapat dikatakan seirama dengan perkembangan zaman dan kepentingan sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Oleh karenanya, hadirnya buku ini akan sangat bermanfaat untuk menambah referensi yang komprehensif tentang HAM untuk dibaca dan dipahami oleh semua kalangan yang berminat mempelajari Hak Asasi Manusia, baik dari kalangan domestik maupun internasional.

Penulis : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

(Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI)

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-372-089-2

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 210 hlm Tahun : 2021 : IDR 95K Harga

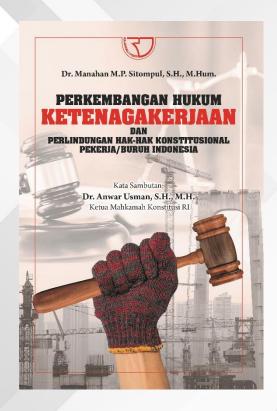






# PERKEMBANGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL, PEKERJA/BURUH INDONESIA





Buku ini mengupas bagaimana perlindugan hak-hak konstitusional pekerja/buruh dalam perusahaan yang mengalami kepailitan, perlindungan hak-hak pekerja migran dan juga perlindungan hakhak pekerja/buruh dalam perkembangan kontemporer.

Lebih mendalam lagi juga mengupas hal ihwal perusahaan dinyatakan pailit dan insolvent, Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dapat hadir sebagai kuasa dalam rapat verifikasi dan memasukkan daftar tagihan-tagihan hak upah para pekerja/buruh yang belum dilunasi oleh pengusaha (debitor) kepada para buruh sebagai kreditor preferen. Di samping itu, selain pengaruh pandemi ada tantangan disrupsi di seluruh dunia yang dihadapi buruh terutama di era otomasi yang sedang berlangsung dengan tidak terbendungnya lagi digitalisasi.

Terbitnya buku ini diharapkan mampu membuka cakrawala dan khasanah keilmuan di kalangan mahasiswa, akademisi, serta lapisan masyarakat ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan penafsiran MK berkaitan dengan pasal-pasal yang diatur dalam UUD 1945.

: Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.Hum. **Penulis** 

(Hakim Konstitusi)

**ISBN** : 978-623-372-144-8

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 250 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 105K





## INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW





# INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW



Indonesia's hastily designed 1945 Constitution was supposed to be temporary. Yet the nation's first two presidents, Soekarno and Soeharto, used it as a basis for holding power for much of the country's first half-century of independence. When the 1945 Constitution was finally reformed and expanded through a series of amendments over 1999—2002, it ushered in asignificantly different state administrative system and practice. However, the amendments have not resolved all problems in Indonesia's political and legal System.

Drawing on their wealth of knowledge and experience, Saldi Isra and Pan Mohammad Faiz, two of Indonesia's leading constitutional law experts, shedlight on the challenges and developments of Indonesian constitutional law inthe post-amendment era. Taking readers behind the conflicts and controversies, they also offer suggestions on how the nation's constitutional rights and functions can be improved.

This book is essential reading for academics, scholars and "Indonesianists' desirous of broadening their knowledge of Indonesian constitutional law.

Penulis : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

(Hakim Konstitusi) Pan Mohamad Faiz

ISBN : 978-623-372-048-9

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 248 hlm

 Tahun
 : 2021

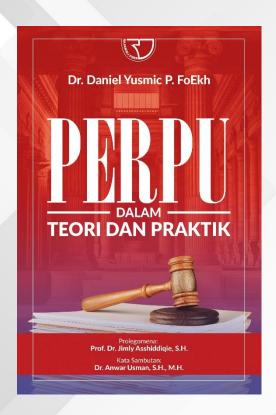
 Harga
 : IDR 150K





# PERPU Dalam Teori dan Praktik





Selama ini kegentingan yang memaksa, sebagai syarat ditetapkan Perpu dalam Pasal 22, dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945 sehingga Perpu tidak dikategori sebagai undang-undang darurat (*emergency law*).

Wewenang Presiden menetapkan Perpu termasuk kekuasaan yang tidak terbatas (*unlimited powers*) karena mengamputasi kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU, mengabaikan kewenangan konstitutional DPD, dan tanpa memberi ruang bagi partisipasi masyarakat Perpu. Selain itu, Perpu yang disetujui DPR berubah menjadi UU dan berlaku permanen, bertentangan dengan prinsip negara hukum, demokrasi dan paham konstitusionalisme. Semua Presiden tanpa kecuali, termasuk dua Pejabat Presiden, pernah mengunakan kewenangan ini, yang hingga tahun 2020 terdapat 216 Perpu.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the sole interpreter of the constitution* kemudian menafsirkan berwenang menguji Perpu, sehingga dalam praktik ketatanegaraan saat ini, Perpu selain diawasi secara politik oleh DPR, juga secara hukum oleh MK.

Buku ini menawarkan desain Perpu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai *iuscontituendum*.

Penulis : **Dr. Daniel Yusmic P. FoEkh** 

(Hakim Konstitusi)

ISBN : 978-623-372-143-1

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 536 hlm

 Tahun
 : 2021

 Harga
 : IDR 213K

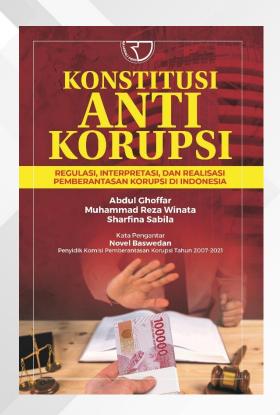




#### KONSTITUSI ANTI KORUPSI

Regulasi, Interprestasi, dan Realisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia





Buku ini merupakan hasil refleksi terhadap kondisi empiris praktik korupsi yang masih menjadi isu krusial dan kritis di Indonesia saat ini. Kontemplasi memunculkan hipotesis bahwa terdapat korelasi antara karakteristik korupsi dan konstruksi konstitusi pada suatu negara.

Untuk menjawab diskursus inilah maka dikaji lebih lanjut secara komprehensif di dalam buku ini. Buku ini dibuka dengan penjelasan mengenai konsep dasar terkait dengan konstitusi dan korupsi berdasarkan berbagai teori dan doktrin para ahli hukum.

Berdasarkan perspektif regulasi, buku ini menelaah konstruksi substansi konsititusi di Indonesia merujuk pada sejarah penerapan konstitusi yang pernah berlaku semenjak masa kemerdekaan hingga era reformasi saat ini.

Untuk mempertajam analisis, dalam buku ini juga dikomparasikan pengaturan konstitusi dari berbagai negara di dunia yakni, Selandia Baru, Denmark, Findlandia, Suriah, Sudan Selatan, dan Somalia berdasarkan pertimbangan peringkat negara-negara dengan Indeks Persepsi Korupsi paling tertinggi dan terendah di dunia.

**Penulis** : Abdul Ghoffar, Muhammad Reza Winata,

Sharfina Sabila

: 978-623-372-109-7 **ISBN** 

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 316 hlm Tahun : 2021 : IDR 127K Harga





## HUKUM PERKAWINAN DAN DINAMIKANYA





Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adanya dinamika hukum perkawinan terkait permasalahan hukum dalam implementasi Putusan MK seperti kekosongan hukum, halangan pelaksanaan undang-undang, dan penyelundupan hukum, maka perlu perhatian untuk perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai bahan perbandingan hukum perkawinan di negara lain, perlunya uraian syarat untuk melaksanakan perkawinan yang sah di 5 (lima) negara yakni India, Turki, Singapura, Australia, dan Albania beserta konstitusinya terkait pengaturan perkawinan. Hal inilah yang dikaji di dalam buku ini.

Karenanya, buku ini penting untuk dibaca dan dilakukan kajian untuk mendapatkan suatu pemikiran baru untuk pengembangan dan masukan sebagai partisipasi dalam rangka pembentukan Undang-Undang Perkawinan yang lebih baik di masa mendatang.

: Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H. Penulis

ISBN : 978-623-372-076-2

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 228 hlm Tahun : 2021 : IDR 98K Harga

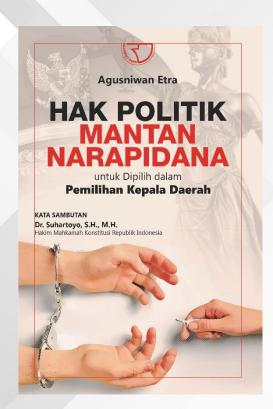




#### HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA

Untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah





Sebuah keniscayaan ketika pembatasan hak pilih warga negara menjadi sesuatu yang sulit dihindarkan, disebabkan beragamnya jenis jabatan politik yang dipilih dalam konstestasi pemilu ditambah berbedanya kondisi masing-masing warga negara yang memiliki hak pilih, sehingga tidak dapat disamakan pengaturan dalam menggunakan hak pilih. Pembatasan penggunaan hak pilih tersebut menyebabkan sebuah perbedaan yang diejawantahkan dalam bentuk syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan.

Secara konstitusional pembatasan hak itu dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2) memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang, akan tetapi pembatasan hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasanalasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan.

Pembatasan tersebut haruslah dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penulis : **Agusniawan Etra** ISBN : 978-623-372-111-0

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 258 hlm

 Tahun
 : 2021

 Harga
 : IDR 106K

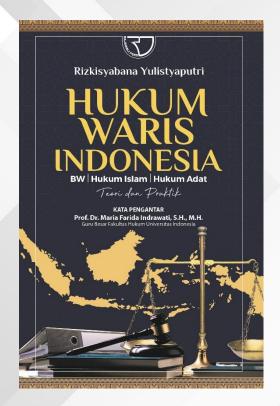




#### **HUKUM WARIS INDONESIA**

## BW | Hukum Islam | Hukum Adat Teori dan Praktik





Pluralisme merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia, tak terkecuali pluralisme dalam berlakunya hukum perdata di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah hukum waris. Hingga saat ini dikenal ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat. Pembagian berlakunya hukum waris tersebut secara garis besar di dasarkan oleh agama dan adat orang yang bersangkutan.

Hal-hal yang berkaitan dengan waris, dianggap sensitif bagi masyarakat, karena tak jarang menimbulkan perpecahan dalam suatu keluarga. Masalah yang timbul tersebut tidak hanya mengenai berapa bagian dari masing-masing ahli waris, namun bisa jadi meluas kepada siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, ataupun apa saja yang berhak dilakukan ahli waris terhadap harta warisan yang didapatkannya.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mendapatkan suatu mufakat biasanya merupakan pilihan pertama dalam menyelesaikan sengketa waris, terkadang penyelesaian sengketa tersebut juga harus dibawa ke ranah hukum, baik ke Pengadilan Agama, maupun ke Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung.

Penulis : Rizkisyabana Yulistyaputri

ISBN : 978-623-372-162-2

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 170 hlm

 Tahun
 : 2021

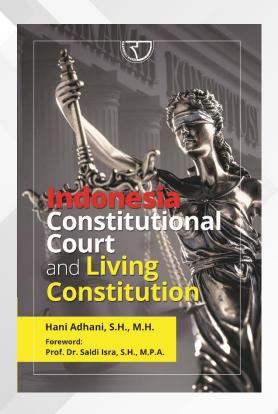
 Harga
 : IDR 78K





## INDONESIA CONSTITUTIONAL COURT AND LIVING CONSTITUTION





The constitution as the supreme law is a crucial feature for a country to maintain the constitutionality of citizens and protect human rights. Indonesia, as a country that has a new constitution, which is the result of amendments, has also played an essential role in efforts to safeguard human rights with the establishment of the Constitutional Court as a new court tasked with being the guardian of the constitution, guardian of human rights, guardian of democracy and guardian of citizens' rights.

Since the Constitutional Court was established on August 13, 2003, many cases have been decided by the Constitutional Court in its development. As a result, some Constitutional Court decisions have become landmarks, making it easier for the public to understand the importance of the Indonesian Constitution and the Constitutional Court. In addition, the decision of the Constitutional Court has a significant effect on the interpretation of the constitution, which so far has only been understood as a written text which is very difficult for ordinary people to understand.

**Penulis** : Hani Adhani, S.H., M.H.

: 978-623-372-096-0 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 208 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 95K





## MENEGAKKAN KEADILAN **SENGKETA HASIL PILPRES** Catatan Media, Fakta, dan Pengalaman





Mahkamah Konstitusi dengan suka hati dan kesadaran penuh telah melakukan sesuatu sebagaimana pesan Justice Douglas bahwa "a trial is a public event. What transpires in the courtroom is public property". Proses peradilan adalah peristiwa publik. Apa pun yang terjadi di ruang sidang merupakan milik/domain publik.

Oleh karena itu, merupakan hak publik untuk mengetahui (right to know) apakah Mahkamah Konstitusi sekalian dengan manusia aparatur di dalamnya telah menempuh cara-cara yang adil dan tepercaya dalam melaksanakan tugas suci yang diamanahkan?

Dalam buku ini dapat dibaca perihal upaya dan komitmen Mahkamah Konstitusi yang membuka 'lebar-lebar' pintu dirinya agar hak publik itu terpenuhi. Potret rupa-rupa dan aneka peristiwa, baik yang direkam oleh para jurnalis media maupun yang berakar dari fakta dan pengalaman, termasuk detail-detail yang (mungkin) nyaris tak terungkap, dibentangrentangkan secara terbuka, jujur, runtut, dan utuh sepanjang Mahkamah Konstitusi mengadili perkara sengketa hasil pilpres.

**Penulis** : Fajar Laksono Suroso

: 978-623-372-114-1 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 490 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 195K





#### OTORITAS JASA KEUANGAN

## Penjaga Stabilitas Sistem Keuangan Negara





Buku ini membahas terkait bagaimana fungsi Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendukung Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pencegahan tidak terjadinya likuidasi perbankan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk dengan undang-undang. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang OJK dalam Pasal 34, fungsi pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh BI dipindahalihkan pada lembaga yang independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan adanya pengalihan tersebut fokus BI sebagai penjaga stabilitas moneter dan OJK sebagai penjaga stabilitas keuangan. OJK memiliki kewenangan dalam peranannya mendukung BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui tindak pencegahan terjadinya likuidasi perbankan. Karenanya, diperlukan adanya dasar hukum untuk tindakan pencegahan dan penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan (SSK).

Penulis : **Juliana Tika Murni** ISBN : 978-623-372-153-0

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 164 hlm

 Tahun
 : 2021

 Harga
 : IDR 77K

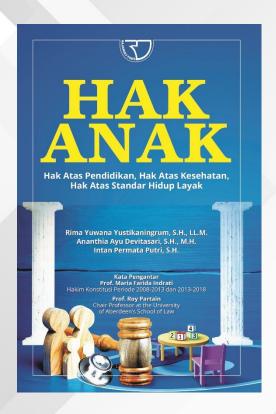




#### HAK ANAK

Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak





Tema ini diangkat bukan hanya sekadar untuk memperkaya literatur terkait hak anak. Namun, buku ini juga menyuguhkan perspektif lain terkait pemenuhan hak a quo pada salah satu kelompok rentan.

Buku ini terbagi dalam empat bagian.

- 1. Pengantar terkait hak anak secara umum.
- 2. Hak pendidikan pada anak sesuai prinsip availability, accessibility, acceptability, and adaptability.
- 3. Hak kesehatan, diperkaya dengan perbandingan pemenuhan hak kesehatan di Negara Belanda, Jerman, Amerika Serikat, dan Afrika.
- 4. Hak-hak anak yang belum secara luas dikenal dan dikaji lebih lanjut seperti hak anak atas standar hidup yang layak, hak anak dalam menyatakan pandangannya dan didengar, serta hak anak yang bekerja.

Buku ini berisi data, perbandingan beberapa negara baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan, serta diperkaya kasus-kasus hukum yang telah diputus dari beberapa negara.

**Penulis** : Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.

Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.

Intan Permata Putri, S.H.

ISBN : 978-623-372-119-6

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 240 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 104K

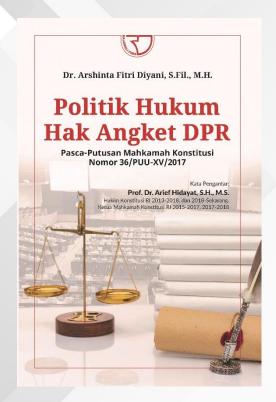




#### POLITIK HUKUM HAK ANGKET DPR

## Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017





Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan prinsip checks and balances untuk mewujudkan kekuasaan berimbang yang dibatasi konstitusi. Wujud prinsip ini dalam ketatanegaraan Indonesia terlihat pada fungsi pengawasan DPR RI vang diamanatkan oleh UUD NRI RTahun 1945 melalui hak angket.

Hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR. Hak ini melekat pada fungsi atau jabatan DPR. Oleh karena itu, hak hak angket diletakkan sebagai hak institusi atau hak kelembagaan. Dengan demikian, hak angket adalah perangkat untuk merealisasikan fungsi DPR. Selain hak kelembagaan, hak perseorangan (anggota) juga menjadi alat untuk merealisasikan pelaksanaan fungsi DPR seperti hak mengajukan usul rancanangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat.

Fungsi DPR tidak mungkin terlaksana melalui tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu tanpa menggunakan hak kelembagaan. Penggunaan hak kelembagaan utamanya hak angket menjadi petunjuk berfungsinya DPR.

**Penulis** : Dr. Arshinta Fitri Diyani, S.Fil., M.H.

ISBN : 978-623-372-080-9

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 230 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 98K

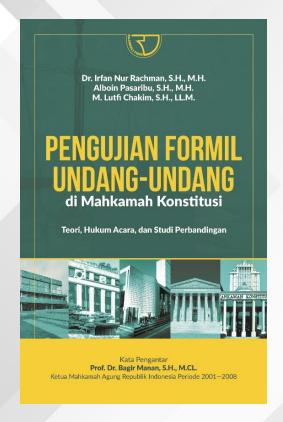




## PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Teori, Hukum Acara, dan Studi Perbandingan





Menguji secara formil undang-undang merupakan sesuatu yang melekat pada hakim (inherent power of the judge). Di sinilah pentingnya kehadiran buku ini, bukan saja penting sebagai kajian keilmuan tetapi dalam menjalankan praktik pengujian yang makin digemari sampaisampai jumlahnya lebih banyak dari pada yang diajukan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, ataupun Mahkamah Konstitusi Jerman..

> Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (Ketua Mahkamah Agung Periode 2001 -2008)

Buku ini memiliki bobot tersendiri karena ditulis oleh mereka yang mengalami dan menyaksikan bagaimana pengujian formil dilakukan. Semakin menarik untuk dibacakarena penulis melengkapi materi tulisan dengan teori-teori mengenai prinsip dan standar pengujian formil, ketentuan hukum acara pengujian, dissenting dan concurring opinions dari Hakim-hakim Konstitusi, serta perbandingan pengujian formil di Amerika Sertikat, Jerman, Afrika Selatan, serta Korea Selatan.

> Prof. Susi Dwi Harijanto, S.H., LL.M., PhD. (Guru Besar HTN FH Universitas Padjadjaran)

**Penulis** : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

> Alboin Pasaribu, S.H., M.H. M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.

ISBN : 978-623-372-131-8 Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 196 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 87K





### **ARGUMENTUM IN CONSTITUTUM**

## Kapitalis Selekta Pemikiran Hukum dan Konstitusi





Reformasi konstitusi telah melahirkan salah satu lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk menjaga nilai-nilai konstitusi agar selalu tegak dan tidak terlanggar akibat berlakunya undang-undang. Untuk menjalan-kan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan Hakim Konstitusi yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi. Selain menuangkan pendapat hukum (legal opinion) di dalam putusan-putusannya, para Hakim Konstitusi kadang kala juga menulis artikel ilmiah sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan peradilan.

Kapita selekta ini memuat 12 (dua belas) artikel berkualitas yang ditulis oleh para pakar hukum dan konstitusi yang pernah dan sedang menduduki posisi strategis sebagai Hakim Konstitusi. Tema artikelnya pun sangat beragam, mulai dari partai politik, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemakzulan Presiden, kewenangan lembaga peradilan, pengujian konstitu-sionalitas, otonomi Papua, Mahkamah Konstitusi, sistem noken, korupsi dan kekuasaan, lembaga negara, sengketa Pilkada, hingga sistem outsourcing.

**Penulis** : Jimly Asshiddigie, Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dkk

ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm

Halaman Tahun : 2021 Harga : IDR 125K





### ARGUMENTUM IN JUDICATUM

#### Senarai Analisis Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi





Hadirnya buku ini terinspirasi dari pernyataan Steven Bradford dalam salahsatu artikelnya yang menuliskan, "Jaw reviews hold a special place of trust andimportance in the legal system and in society", memublikasikan artikel di sebuah jurnal hukum adalah sebuah kehormatan dan keistimewaan, artikel jurnal hukum memiliki nilai dan manfaat yang sangat besar bagi sistem hukumdan masyarakat. Sebagai upaya untuk semakin memperluas cakupan diseminasi dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka pilihan untuk menerbitkan sejumlah artikel ke dalam bentuk buku adalah pilihan vang relevan.

Luasnya cakupan tema-tema yang berkaitan dengan putusan MK menjadi wahana yang sangat strategis bagi para pemerhati hukum dan konstitusi untuk menganalisisnya dalam multiprespektif. Mengkaji, meneliti dan menulis tentang putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah ikhtiar membangun diskursus akademik dalam konteks konstitusi dan ketatanegaraan. berskontitusi, peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara hingga dialektika pascaputusan adalah bagian dari tugas utama mahkamah konstitusi.

**Penulis** : Mohammad Mahrus Ali

> **Anna Triningsih** : 978-623-372-258-2

ISBN Ukuran : 15 x 23 cm

Halaman : 274 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 114K







#### ARGUMENTUM IN SCRIPTUM

## Kompilasi Kajian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi





Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the final interpreter of constitution dan the quardian of the constitution, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia.

Secara teoritis dan konspetual putusan final mengandung makna bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (the first resort) sekaligus upaya terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan. Kemudian dalam perkembangan ketatanggaraan akhir-akhir ini, (compliance) lembaga-lembaga kepatuhan negara dalam melaksanakan putusan MK menjadi persoalan. Terhadap sejumlah putusan MK, lembaga yang menjadi adressat putusan tersebut tidak melaksanakan dan bahkan mengabaikan putusan tersebut.

Buku ini sangat penting dibaca sebagai sebuah jendela untuk memahami lebih mendalam mengenai putusan-putusan MK melalui beberapa riset yang dikemas dalam artikel ilmiah. Kalangan akademis, peneliti, pemerhati dan pengambil kebijakan perlu mencermati kajian komprehensif di dalamnya khususnya berkaitan dengan bagaimana seharusnya putusan MK diimplementasikan oleh addresat putusan.

**Penulis** : Mohammad Mahrus Ali **Achmad Edi Subiyanto** 

ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 300 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 125K



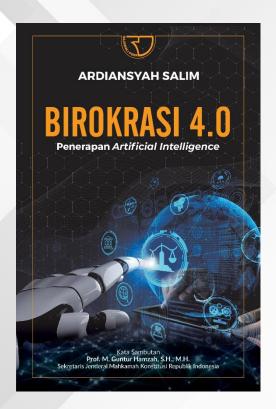




#### **BIROKRASI 4.0**

### **Penerapan Artificial Intelligence**





Derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi menciptakan inovasi-inovasi dalam aspek-aspek kehidupan manusia.

Salah satu inovasi dalam perkembangan teknologi adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sebenarnya kalau ditilik dari aspek historisnya sudah ada sejak dahulu, bahkan kalau ditelusuri dari literatur-literatur kuno, kecerdasan buatan bahkan sudah diinisiasi oleh mitologi Yunani hingga ilmuwan Muslim bernama Jabir bin Hayyan, yang diulas dalam bab tersendiri dalam buku ini terkait sejarah kecerdasan buatan.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana. Perspektif penulis sampaikan juga dilihat dari aspek nonteknis sehingga tidak menggunakan istilah-istilah bahasa pemrograman yang njlimet.

Buku ini juga dapat menambah khazanah literatur berbahasa Indonesia terkait kecerdasan buatan bagi kemajuan bangsa kita yang tercinta

: Ardiansyah Salim **Penulis** ISBN : 978-623-372-145-5

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 340 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 136K

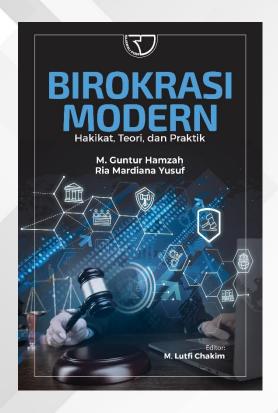




#### BIROKRASI MODERN

Hakikat, Teori, dan Praktik





Mendengar kata "birokrasi", biasanya ingatan kita tertuju pada organisasi dengan banyak meja, layanan berpindah-pindah dari satu meja ke meja yang lain, berjenjang, hirarkis, dan identik dengan inefisiensi, lamban, boros, dan stereotip negatif lainnya. Padahal sejatinya kata Max Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Buku ini sangat menarik karena tidak hanya berisi tentang teori dan konsep baru tentang birokrasi, tapi juga menyuguhkan diskursus tentang hakikat birokrasi dan penerapannya di era disrupsi dewasa ini, serta praktik birokrasi di Mahkamah Konstitusi yang dikenal modern, dinamis dan terjaga untuk menerapkan birokrasi modern seperti di Mahkamah Konstitusi.

Buku ini menegaskan bahwa birokrasi hendaknya dipahami tidak hanya dilihat sebagai sistem kerja yang berbasis ICT, namun lebih dari itu birokrasi hendaknya konsisten menerapkan prinsip-prinsip METACORD vaitu meritocracy, empower-ment, transparent, adaptive, collaborative, obedient, responsive, dan digital). Penerapan METACORD principles ini diyakini akan membedakan cara kerja birokrasi model lama (old style) dengan birokrasi modern.

: Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. **Penulis** 

Prof. Dr. Ria Mardiana Yusuf, S.E., M.Si.,

CLC., CHCBP.

ISBN

: 15 x 23 cm Ukuran

Halaman : -

Tahun : 2021 Harga : IDR 110K

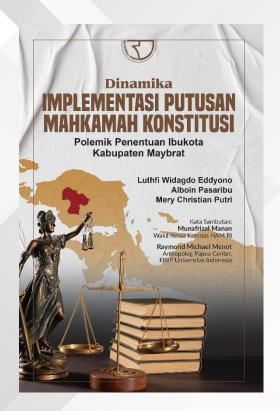




# DINAMIKA IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Polemik Penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat





Salah satu hal yang mendasar dari setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah terkait implementasi putusannya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi bukanlah institusi yang memiliki aparatus untuk memastikan penerapan putusannya. Mahkamah hanyalah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusional yang menjadi kewenangan atau kewajibannya berdasarkan konstitusi.

Salah satu perkara yang menjadi polemik berkepanjangan dan terkait dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat. Terjadi penolakan terhadap putusan ini yang mengakibatkan kerusuhan fisik di Kabupaten Maybrat sampai akhirnya diselesaikan yang menciptakan polemik hukum lain, yaitu keluarnya peraturan pemerintah yang menegasikan putusan MK. Polemik tersebutlah yang dikaji dalam buku ini.

Isi dari buku ini tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan putusan, akan tetapi terkait dengan sosial kultural dan kajian lain yang juga 'sangat menarik yaitu departementalisme yang jarang diteliti.

Penulis Luthfi Widagdo Eddyono, Alboin Pasaribu,

**Mery Christian Putri** 

ISBN : 978-623-372-125-7

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 192 hlm

 Tahun
 : 2021

 Harga
 : IDR 87K







## EKSISTENSI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH





Buku ini memiliki kebaharuan hukum dalam tataran akademis dan praktis.

Pada tataran akademis, buku ini memberikan elaborasianalitis bahwa positivisme hukum terbangun dan akan terus terbentuk sebagai sebuah proses interpretasi dan konstruksi hukum dalam mencari dan mendefinisikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kedua proses tersebut menjawab tantangan terbesar dalam positivisme hukum bahwa sistem hukum harus menyediakan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang timbul.

Buku ini menyajikan fakta kejadian dan fakta hukum secara berimbang dan runtut dalam konstruksi siapa, apa, bagaimana, kapan, dan di mana hak dan kewajiban hukum yang timbul. Kedua fakta tersebut disajikan sebagai dasar analisis yang mencerahkan dan menantang dalam penalaran hukum kritis, analitis dan konstruktif mengenai eksistensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan memberikan justifikasi atau rasionalitas KKR di level nasional kelak di kemudian hari.

Penulis : Lufthi Widagdo Eddyono, Mery Chistian Putri,

Rizkisyabana Yulistyaputri

ISBN : 978-623-372-112-7

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 180 hlm

 Tahun
 : 2021

 Harga
 : IDR 80K







#### **HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH**

#### Dalam Penafsiran Mahkamah Konstitusi





Selama hampir dua dekade Mahkamah Konstitusi berdiri, pengujian undang-undang terkait hukum pemerintahan daerah berkembang dan secara progresif merekonstruksi norma-norma terkait pemerintahan daerah.

Sejak periode 2003-2020, Mahkamah Konstitusi telah menguji kurang lebih 38 putusan terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 73 putusan terkait undang-undang pemilihan kepala daerah, serta puluhan putusan lainnya yang menguji norma dalam undang-undang lain yang beririsan dengan hukum pemerintahan daerah. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melacak jejak penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk dinamika hukum pemerintahan daerah.

Buku ini mengkaji lebih mendalam mengenai dinamika hukum pemerintahan daerah hukum pemerintah daerah dalam bingkai tafsir konstitusional. Ragam penafsiran yang termuat dalam putusan MK terkait otonomi khusus dan daerah istimewa, dimensi konstitusional pemekaran, batas wilayah, dan penetapan ibu kota daerah.

**Penulis** : Alboin Pasaribu, Anantha Ayu Devitasari

**Mohammad Marus Ali** 

: 978-623-372-178-3 ISBN

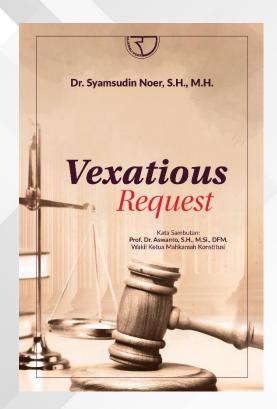
Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 240 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 105K





## **VEXATIOUS REQUEST**





Tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke MK dan menjadi pemohon yang mana permohonan terkesan dibuat secara tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik.

Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tatausaha negara tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan setiap permohonan. Dalam hukum acara perdata dikenal adagium point d'interestpoint d'action atau standing to sue yang dapat diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut.

Prinsip peradilan cepat, sederhana dan tanpa dipungut biaya dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses persidangan, mulai dari registrasi permohonan hingga keluarnya putusan di MK bebas dari biaya.

Penulis : **Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.** 

ISBN : 978-623-372-146-2

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 200 hlm

 Tahun
 : 2021

 Harga
 : IDR 93K

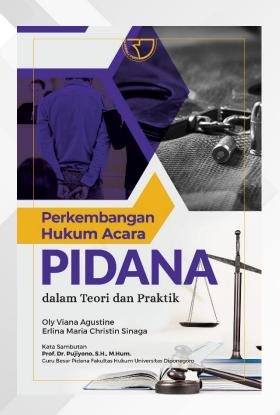




#### PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA

Dalam Teori dan Praktik





Terdapat hambatan dalam pengimplementasian hukum acara pidana yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu perubahan paradigma dari aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan dalam pengimplementasian dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hukum acara pidana. Perubahan dapat dilakukan dengan memahami bahwa selain undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan sumber hukum yang sah di Indonesia termasuk didalamnya hukum acara pidana.

Dengan adanya perkembangan ketentuan dalam hukum acara pidana yang lahir dengan putusan Mahkamah Konstitusi, berarti terdapat ketentuan baru yang berlaku pada suatu ketentuan tertentu sebagaimana amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan hukum baru tersebut sah dan sesuai dengan pemberlakuan asas lex posterior derogat legi priori yang menghendaki ketentuan yang baru dibuat menyampingkan ketentuan yang lama dengan catatan kedua peraturan tersebut dalam derajat hierarki yang sama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memiliki kekuatan dan derajat sama dengan undang-undang.

Oleh karena itu, sudah selayaknya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum acara pidana.

**Penulis** : Oly Viana Agustine

**Erlina Maria Chistin Sinaga** 

: 978-623-372-130-1 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 250 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 107K





## PRAKTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI





Materi dalam buku yang berjudul "Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Suatu Pengantar" bersumber dari peraturan perundang-Undang-Undang undangan yang meliputi, Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta dalam praktik dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Buku ini menguraikan mengenai praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi, administrasi peradilan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pengucapan putusan, dan penyampaian salinan putusan kepada parapihak. Selain itu untuk memudahkan pembaca memahami bentuk-bentuk dokumen hukum pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, dalam buku ini dilampirkan juga contoh-contoh dokumen hukum tersebut, antara lain akta bentuk permohonan, registrasi perkara konstitusi, serta berita acara penyampaian.

**Penulis** : Achmad Edi Subiyanto

**Anna Triningsih** 

ISBN : 978-623-372-172-1 Ukuran : 15 x 23 cm

Halaman : 220 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 108K





#### **HUKUM TATA NEGARA**

### Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia





# Hukum Tata Negara

Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia



Buku ini membahas mengenai materi Hukum Tata Negara tidak hanya secara teoretik, melainkan pula perkembangan ketatanegaraan yang diakibatkan oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Banyak bagian-bagian dari buku ini yang tidak akan ditemukan dari buku hukum tata negara sejenis yang beredar di pasaran.

Oleh karena itu, buku ini sangat cocok digunakan oleh pembaca sekalian sebagai bahan ajar di perkuliahan karena sudah disesuaikan dengan silabus, dapat digunakan sebagai bahan kajian, maupun bahan penelitian.

Hanya dalam buku ini dapat dibaca perihal dinamika putusan mahkamah konstitusi dalam perubahan ketatanegaraan, dinamika ketatanegaraan kekuasaan legislatif bagi DPR mengenai jangkauan fungsi anggaran DPR, recall anggota DPRdan DPRD, batas hak imunitas anggota DPR dan kewenangan pengawasan MKD, jenis perjanjian internasional yang mensyaratkan persetujuan DPR, batas kewenangan DPR dalam pemilihan Hakim Agung, syarat hak menyatakan pendapat DPR, dan rapat konsultasi KPU-DPR yang tidak mengikat: sedangkan kewenangan DPD terkait kewenangan legislasi DPD, syarat domisili calon anggota DPD dan pelarangan pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Penulis : Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya,

**Abdul Nasid Fuadi** 

ISBN : 978-623-372-180-6

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 302 hlm

 Tahun
 : 2021

 Harga
 : IDR 125K





# Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati





Bu Maria yang adalah Guru Besar di bidang hukum perundangundangandikenal sebagai orang yang tekun, pandai, dan penuh dedikasi. Selama lima tahun menjadi Ketua MK (2008-2012), saya mempunyai kesan yang mendalam tentang Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Pemikirannya jernih dan tajam, pendiriannya teguh tak bisa diabaikan. Semua pekerjaan dikerjakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Saya mengatakan kepada Bu Maria bahwa kalau di dalam Islam dirinya bisa disebut sebagai perempuan sholihah, yakni perempuan yang taat pada ajaran agama dan berbuat baik dalam tugas-tugasnya di antara sesama manusia. Bu Maria bisa disebut sebagai salah satu contoh bahwa jika orang taat pada ajaran dan bimbingan agamanya, apa pun agama yang dianutnya, maka dia akan selalu berusaha berbuat baik dan menjaga integritas dirinya dalam tugas-tugas kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Mengapa? Karena semua agama itu pada dasarnya mengajarkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama dan berdedikasi kepada kemaslahatan umum.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008-2013)

Editor : **Pan Mohamad Faiz** ISBN : 978-602-1288-91-7

 Ukuran
 : 15 x 23 cm

 Halaman
 : 190 hlm

 Tahun
 : 2021

 Harga
 : IDR 86K

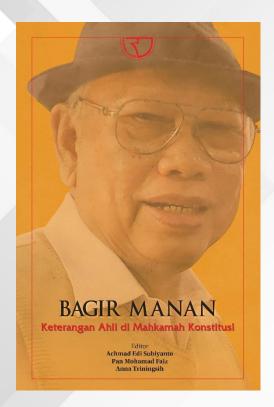




#### BAGIR MANAN

## Keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi





Keterangan ahli yang disampaikan di dalam persidangan merupakan salah satu bentuk kontribusi intelektual bagi proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara di pengadilan. Bahkan, tidak sedikit keterangan ahli yang kemudian menjadi doktrin keilmuan yang dipergunakan untuk mengembangkan konstruksi teori di ruang-ruang akademik.

Buku ini berisi empat belas keterangan ahli yang disampaikan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. dalam berbagai persidangan di Mahkamah Konstitusi. Keterangan ahli tersebut telah dikelompokkan secara sistematis ke dalam delapan bagian yang terpisah berdasarkan isu konstitusionalitasnya, yaitu: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Perpajakan, Peradilan, Kejaksaan, Pemekaran Wilayah, Pendidikan, Angkutan Jalan, dan Perjanjian Internasional.

Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (2001-2008), pendapat dan pemikiran Bagir Manan terhadap berbagai isu konstitusionalitas di atas menjadi sangat layak untuk dipahami.

**Penulis** : Achmad Edi Subiyanto, Pan Mohamad Faiz,

**Anna Triningsih** 

: 978-623-372-171-4 ISBN

Ukuran : 15 x 23 cm Halaman : 269 hlm Tahun : 2021 Harga : IDR 113K

















Book Signing Penulis untuk para Pembaca



Mahkamah Konstitusi RI dan Penerbit PT RajaGrafindo Persada Berkolaborasi Menjaga Literasi Konstitusi

# DENGAN BUKU, INDONESIA BERTUMBUH

Salam Ziterasi